

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANSIAL

Edisi April II Tahun 2021 No. 13

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Tolak Tegas Rencana Penyesuaian Tarif Listrik



Alpa dan Lalai dalam Urusan Negara

Jika sekali alpa kita bisa bilang wajar, jika kemudian berulang kali dan tercecer dibanyak bukti rasanya kita patut khawatir. Jangan-jangan cara kerja yang dilakukan tergesa-gesa dan tuna narasi.

Keriuhan datang silih berganti, bersamaan dengan kebijakan yang tidak teliti. Dari mulai pangkal, ranting, hingga akar. Sebuah kerja administrasi yang seharusnya tidak terjadi untuk institusi bernama negara. Karena di dalamnya ada birokrasi, koalisi hingga kumpulan ahli.

Ada beberapa catatan, legalisasi miras menyembul di tiga pasal lampiran sebuah perpres tentang investasi. Jika publik tidak awas dan cermat, hampir saja negeri ini masuk ke jurang kerugian yang paripurna. Jangan tengok UU asal mula perpres itu muncul, lebih punya masalah lagi karena revisi dan edisinya saja berubah dalam

dua pekan sebanyak lima kali pasca disahkan di parlemen.

Kita pikir semua akan selesai, perbaikan dilakukan dan evaluasi menyeluruh ditunaikan. Namun ternyata proses copy, paste dan cut terjadi dalam banyak bahan dan produk. Tengok saja kala hilangnya frasa 'agama' dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional. Padahal "blue print" itu sudah sepatutnya merujuk kepada ayat 5 Pasal 31 UUD 1945, poin pertama Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003. Sikdisnas yang menjelaskan secara eksplisit agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional.

Tidak cukup sampai disitu,

Pancasila dan Bahasa Indonesia sempat raib dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Yang terkini KH Hasyim Asy'ari tidak termuat dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Beragam alasan diumbar dari mulai alpa, hingga beralih bukan terbitan resmi. Ironis dan anehnya tokoh-tokoh kontroversial dan yang tidak senapas dengan falsafah bangsa bermunculan di buku yang katanya belum dicetak resmi itu. Nampak arah pendidikan tidak ketimur dan tidak ke barat. Hilang kendali menanggalkan nilai-nilai luhur negeri.

jika sekali alpa kita bisa

bilang wajar, jika kemudian berulang kali dan tercecer dibanyak bukti rasanya kita patut khawatir. Jangan-jangan cara kerja yang dilakukan tergesa-gesa dan tuna narasi.

"The Devil is in the details" adalah peribahasa yang menggambarkan bahwa detail yang terlihat kecil dan sederhana bisa sangat berpengaruh terhadap hal yang lebih besar. Detail bisa menjadi sesuatu sangat penting. Terlebih di dunia pendidikan yang mengajarkan tata aturan menulis dan membaca.

Kita bersyukur masih banyak komponen negara dan elemen bangsa yang menaruh perhatian lebih (well inform)

terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan. Kecermatan dan daya kritis mereka sungguh menjadi teman dalam mengoreksi kerja-kerja pemerintah yang tidak rapih. Kadang bukan berarti oposisi, bisa jadi di dia datang dari teman koalisi. Sesungguhnya jika itu terjadi maka demokrasi yang partisipatif dan saling menjaga sedang kita lakukan. Kita benar-benar khawatir jika yang terjadi adalah sebaliknya yaitu bersemangat memberikan pembenaran atas kesalahan dan mendukung kecerobohan. Nalar harus tetap berjalan agar arah bangsa tidak terbelokkan oleh sesuatu yang fana dan bersifat pragmatis.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Fraksi PKS Serahkan Bantuan Simbolis kepada Masyarakat Korban Bencana di NTT

KUTIPAN

Jakarta (08/04) —
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
secara simbolis me-
nyerahkan bantuan,

yang diperuntukkan bagi korban
bencana di Nusa Tenggara
Timur dan Nusa Tenggara Barat,
dari ruang Meeting 1 lantai 3,
Gedung Nusantara 1, Kamis,
(08/04).

Ketua Fraksi PKS DPR RI,
Jazuli Juwaini, dalam sambu-
tannya mengucapkan duka
mendalam bagi para korban
bencana banjir di NTT dan NTB.

"Kami merasa prihatin dan
duka mendalam atas bencana
di NTT dan NTB yang menelan
korban. Mudah-mudahan yang
meninggal Allah terima segala
amal baiknyanya dan yang
mengalami luka-luka Allah
berikan kesembuhan," ungkap
Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sebagai bentuk
keprihatinan dan duka, imbuh
Jazuli, Fraksi PKS mengambil
kebijakan untuk memotong gaji
anggota dewan dari pusat
hingga daerah.

"Sebagai seorang muslim
kita wajib membantu saudara
kita yang tertimpa musibah di
NTB dan NTT. Kita bantu secara
serius, walau besarnya tidak
seberapa, tapi ini secara riil
kami lakukan untuk membantu
korban bencana," tegas Anggota
DPR dari Dapil Banten II ini.

Jazuli menambahkan,
pihaknya berharap kepada
pemerintah agar bisa dengan
baik dalam menangani bencana
ini. Jangan ada yang mengambil
kesempatan dalam kondisi
bencana ini.

"Membantu saudara kita
sebangsa dan setanah air tidak
boleh melihat sukunya apa,
bangsanya apa atau agamanya
apa. Akan tetapi semua wajib
kita bantu. Bingkainya adalah
negara kesatuan republik
Indonesia," terang Jazuli.



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Membantu saudara kita sebangsa dan setanah air tidak
boleh melihat sukunya apa, bangsanya apa atau agamanya
apa. Akan tetapi semua wajib kita bantu. Bingkainya adalah
negara kesatuan republik Indonesia,"

Fraksi PKS : Perlu Komitmen Kuat Wujudkan Demokrasi Pancasila Yang Substantif

KUTIPAN

Fraksi PKS DPR kembali menggelar Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri Ketiga dengan Tema "Melampaui Demokrasi Kita Hari Ini"

menghadirkan narasumber Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan M. Sohibil Iman (Wakil Ketua Majelis Syuro PKS) pada Jum'at (9/4).

Acara yang digelar secara virtual ini, dimulai dengan Pengantar sekaligus arahan dari Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohammad Sohibil Iman dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam pengantarnya mengatakan tema ini sengaja diangkat dalam Mimbar Demokrasi ke-3 untuk mendapatkan perspektif yang jernih, reflektif, dan konstruktif bagaimana mewujudkan demokrasi yang substantif.

"Perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang substantif. Yaitu



demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi negara-negara lain karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus identitas dan karakter bangsa.

Jazuli menambahkan, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila prosesnya berjalan dengan jujur dan adil, tidak adanya tekanan dan paksaan, tidak ada money politik dan hal-hal lain yang menghambat demokrasi menjadi baik.

"Demokrasi Indonesia

berjalan dengan baik ketika awal reformasi namun saat ini demokrasi kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital," pungkas Jazuli.

Money Politics dan Oligarkhi Ancam Demokrasi

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro' Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibil Iman, mengatakan bahwa semua masyarakat rindu akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.

Tapi, Menurut Pria yang akrab disapa MSI ini, demokrasi di negara kita saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita, karena kita masih melihat adanya money politics yang nyata dan membuat demokrasi kita tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.

Kemunduran demokrasi, ungkap Presiden PKS 2015-2020, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah politik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.

"Penyebab mundurnya



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

"Perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang substantif. Yaitu demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945"

demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang tidak baik akibat abuse of power," terang MSI.

Menumbukan Iklim Kesetaraan

Pembicara pamungkas Anies Baswedan dalam paparannya menekankan pentingnya

perasaan kesetaraan dalam membangun budaya demokrasi. Anies mengungkapkan bahwa pihak berwenang harus mampu merawat iklim demokrasi. Hal ini karena demokrasi membutuhkan komitmen yang kuat, nilai keterbukaan, toleransi dan ruang untuk perbedaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Anies: Rawat Demokrasi Dengan Kebijakan Yang Menumbuhkan Kesetaraan

KUTIPAN

Jakarta - (9/4) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan bahwa pihak berwenang harus mampu merawat iklim demokrasi

Hal ini karena demokrasi membutuhkan komitmen yang kuat, nilai keterbukaan, toleransi dan ruang untuk perbedaan. Semua ini hanya mampu dijamin oleh pemegang kewenangan dengan kebijakan publik yang menumbuhkan perasaan setara di antara semua pihak.

“Jika pemegang kewenangan gagal merawat demokrasi, kehidupan masyarakat akan jauh lebih tidak tenang, tidak teduh dan tidak damai.” ujar Anies dalam acara Mimbar Demokrasi yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI di Jakarta, Jumat (9/4).

Anies menjelaskan bahwa menjaga iklim demokrasi dengan benar adalah dengan cara mendengar dan merespon setiap aspirasi rakyat. Setiap aspirasi harus direspon dengan tata krama yang benar. Pandangan yang berbeda harus dihargai sebagai sebuah suara



legitimate dari rakyat. Sehingga, menurut Anies, hal ini dapat menumbuhkan perasaan setara bagi semua pihak. “Mana aspirasi yang direspon tentu ada banyak yang dipertimbangkan. Tetapi, ruang untuk aspirasi tersebut terbuka. Kita juga harus menyadari bahwa kebijakan dan politik itu seringkali membawa unsur perasaan. Karena itu kita harus menjaga dialog dan tukar pikiran tetap tenang, teduh dan damai” ujar Anies

Selain itu, demokrasi harus menumbuhkan partisipasi dari semua pihak. Hal tersebut dicontohkan dengan pengambilan keputusan, mulai dari tingkat RT/RW, semuanya dengan melakukan

rembug/musyawarah dan interaksi langsung dengan masyarakat. “Harapannya, itu akan membuat tidak ada aspirasi yang mampet. Problem problem dapat direspon dengan cepat dan perasaan kesetaraan dapat ditumbuhkan” ujar Anies.

Menurut Anies, wujud dari upaya merawat demokrasi bisa dilihat dari upaya Pemrov DKI menghadirkan ruang publik yang setara. Anies mencontohkan pada pembangunan transportasi umum dan taman, yang menurutnya, dapat menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya kota yang demokratis.

“Kita melihat transportasi tidak sebagai alat pemindah badan, tetapi alat penumbuh kesetaraan. Tidak ada umum dan VIP. Semua mendapatkan fasilitas yang nyaman tanpa memandang latar belakang. Begitu juga pada taman, semua orang dengan strata ekonomi maupun sosial dapat berkumpul di sana tanpa ada sekat.” ujar mantan Mendiknas tersebut.

Bagi Anies, transportasi umum secara tidak langsung menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya. Hal ini akan berdampak pada tumbuh-



H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Gubernur DKI Jakarta

“Wujud dari upaya merawat demokrasi bisa dilihat dari upaya Pemprov DKI menghadirkan ruang publik yang setara. Anies mencontohkan pada pembangunan transportasi umum dan taman, yang menurutnya, dapat menumbuhkan perasaan setara bagi seluruh warganya. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya kota yang demokratis. “

nya kota yang demokratis, yang akhirnya dapat menumbuhkan perasaan kebangsaan.

Terakhir, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI akan terus menjamin iklim demokrasi tetap hidup “Tugas kami di Jakarta adalah

memastikan agar ini berjalan terus, sehingga kita dapat menjaga agar iklim demokrasi dan iklim kesetaraan tetap hidup, dengan kebijakan-kebijakan yang kami implementasikan” ujar Anies.

Sohibul Iman: Demokrasi Indonesia Alami **Masa Kemunduran** dari sejak Awal Reformasi

KUTIPAN

Jakarta (09/04) — Wakil Ketua Majelis Syuro' Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Sohibul Iman, dalam Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan yang digelar Fraksi PKS DPR RI mengatakan bahwa semua masyarakat rindu akan terwujudnya demokrasi yang substantif dan lebih baik.

Tapi, Menurut Pria yang akrab disapa MSI ini, demokrasi di negara kita saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita, karena kita masih melihat adanya money politics yang nyata dan membuat demokrasi kita tidak lebih baik dan adanya kekuatan besar yang disebut oligarki.

"Saya melihat politik dan oligarki ini setali tiga uang sebenarnya, karena ini semua disebabkan karena hal yang sama. Jadi adanya kekuasaan uang dan dipraktikkan dengan jual beli suara, sehingga banyak yang mulai menyuarakan," ungkap Presiden PKS 2015-2020 ini.

Kemunduran demokrasi,



ungkap Sohibul, ditandai dengan ruang partisipasi publik yang semakin menyempit, akibat pintu masuk ke ranah politik semakin berat yang disebabkan biaya politik yang mahal. Akibatnya sirkulasi elit hanya dikuasai oleh orang-orang atau kelompok yang memiliki modal kapital.

"Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang

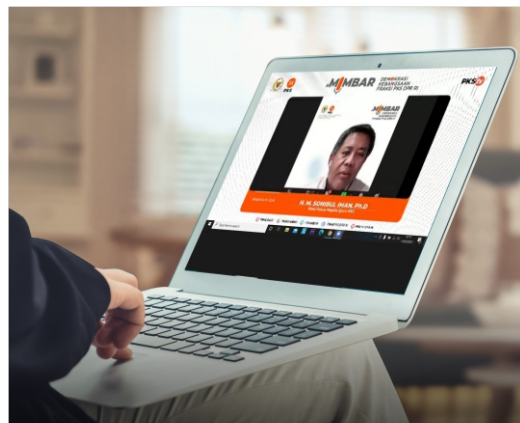
belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power," terang pria yang juga kerap disapa kang Iman.

Pembiayaan demokrasi Indonesia, lanjut MSI, yang menganut pasar bebas konstestasi politik membuat politik Indonesia memburuk, korupsi, politik berbiaya mahal dan oligarki kekuasaan.

"Budaya politik Indonesia tidak terjadi transformasi sehingga menimbulkan gesekan. Misal perbedaan dalam demokrasi. Kemudian masih ada pandangan bahwa menghadapi yang berbeda dengan pandangan zero sum game (saling menihilkan)," pungkasnya.

Indonesia, lanjut MSI, harus memperbaiki cara pandang terhadap kekuasaan. Indonesia harus belajar kesadaran etis dari Jepang bagaimana cara pandang dalam kekuasaan.

"Budaya Jepang, menempatkan kekuasaan sebagai sebuah kepercayaan dan kehormatan maka ketika



H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D

Wakil Ketua Majelis Syuro' PKS

"Penyebab mundurnya demokrasi Indonesia salah satunya akibat dari desain institusi demokrasi kita yang belum tuntas, menyempitnya partisipasi publik, kemudian pengelolaan negara yang baik tidak abuse of power"

terjadi sesuatu yang memalukan maka mundur dari kekuasaan," tuturnya.

Politik itu, kata MSI, seharusnya politik adu gagasan bukan keuangan apalagi menggunakan isu-isu

primordial.

"Melalui demokrasi inilah kita bisa mendorong demokrasi substansi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup MSI.



Semangat
MELAYANI
Semangat
RAMADHAN



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

Program Quote
Hikmah Ramadhan

Ramadhan membentuk manusia sosial dengan orientasi **ketuhanan**

Panja RUU PDP Usulkan Bentuk Otoritas Pelindungan Data Pribadi

KUTIPAN

Sebagaimana diketahui, dalam pembahasan RUU PDP saat ini, pemerintah mengusulkan agar pengawasan perlindungan data pribadi berada di bawah Kominfo. Sementara, Panja RUU PDP memandang perlu lembaga pengawas independen yang menjamin tidak ada konflik kepentingan dan non intervensi.

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga independen yang berwenang menjadi otoritas pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Hal itu disampaikan Ketua Panja RUU PDP sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat Panitia Kerja bersama Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel A Pangraban di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Dalam rapat tersebut, Panja memaparkan matriks susunan pasal 58 dan

perubahannya mengenai pendapat pemerintah dan DPR tentang otoritas perlindungan data pribadi, namun keduanya belum mencapai titik temu.

"Ini gambaran dari draf yang diajukan oleh DPR, lengkap dengan susunan atau usulan tentang lembaga atau otoritas atau badan atau nama yang disepakati, sesuai yang diinginkan dari 9 fraksi di Komisi I," papar Kharis usai membacakan draf sandingan Panja.

Sebagaimana diketahui, dalam pembahasan RUU PDP saat ini, pemerintah mengusulkan agar pengawasan perlindungan data pribadi berada di bawah Kominfo. Sementara,

Panja RUU PDP memandang perlu lembaga pengawas independen yang menjamin tidak ada konflik kepentingan dan non intervensi. Diharapkan, adanya otoritas independen tersebut dapat memberikan keamanan transparansi jika ada penyalahgunaan PDP.

"Kita memang belum akan memutuskan karena belum ada titik temu. Tetapi jika kita sandingkan draf dari kedua belah pihak, kalau memang pemerintah bersikukuh, tidak mau maka bisa kita berikan alternatif solusi dalam kolom yang ada di matriks sandingan," jelas Kharis.

"Mohon ini dipelajari lebih jauh untuk kita diskusikan kembali di rapat panitia kerja mendatang. Saya kira kita bersepakat untuk menyelesaikan undang-undang pada masa sidang mendatang. Perpanjangan sudah kita ajukan, mudah-mudahan dapat lampu hijau untuk satu sidang perpanjangan," tandas politisi PKS itu.

Kharis menuturkan, pembahasan RUU PDP akan dilanjutkan dalam masa sidang mendatang. Mengingat, DPR RI akan memasuki masa reses Masa Persidangan IV mulai Jumat (9/4/2021). (ann/sf)



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

"Kita memang belum akan memutuskan karena belum ada titik temu. Tetapi jika kita sandingkan draf dari kedua belah pihak, kalau memang pemerintah bersikukuh, tidak mau maka bisa kita berikan alternatif solusi dalam kolom yang ada di matriks sandingan, Mohon ini dipelajari lebih jauh untuk kita diskusikan kembali di rapat panitia kerja mendatang.

Saya kira kita bersepakat untuk menyelesaikan undang-undang pada masa sidang mendatang. Perpanjangan sudah kita ajukan, mudah-mudahan dapat lampu hijau untuk satu sidang perpanjangan,"

Lebih 700 Warga Sipil Meninggal
Dalam Krisis Myanmar

Aleg PKS: Perlu Segera Digelar KTT ASEAN

KUTIPAN

Yogyakarta (15/04) --- Sebagaimana dilansir oleh pemberitaan media massa, sejak militer melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari pemimpin sipil pada 1 Februari lalu di Myanmar,

hingga Rabu (14/4/2021) jumlah warga sipil yang meninggal akibat tindak kekerasan dari aparat lebih dari 700 orang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyebut apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah tragedi bagi ASEAN.

Menurutnya para pemimpin ASEAN harus segera melakukan tindakan nyata untuk mencegah korban jiwa berjatuhan.

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkret untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat, mestinya hal ini segera diwujudkan apalagi beberapa

negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei menghendaki bisa diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN. Saya berharap Bu Retno bisa secara intensif melakukan komunikasi dengan para menlu di ASEAN untuk segera mewujudkan KTT tersebut, jika perlu Presiden bisa melakukan hotline kepada para pemimpin di ASEAN karena gentingnya situasi di Myanmar," papar Anggota DPR Dapil Yogyakarta ini.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, para pemimpin ASEAN jangan sampai ragu melangkah karena adanya prinsip non-intervensi ASEAN. Situasi yang terjadi di Myanmar saat ini dengan banyaknya korban sipil menuntut sikap tegas ASEAN untuk campur tangan.

"Yang terjadi di Myanmar saat ini sudah mengarah kepada pembunuhan massal oleh rejim secara sistematis. Ini bentuk kejahatan HAM yang sangat berat. Dalam hal ini ada prinsip internasional Tanggung Jawab untuk Melindungi atau Responsibility to Protect (R2P) yang diusung oleh PBB dimana dimungkinkan adanya intervensi langsung dari suatu negara jika negara lain dianggap gagal melindungi warganya dari kekerasan. Para pemimpin ASEAN tentu sangat paham dengan prinsip ini dan bisa menggunakannya dalam menyikapi krisis di Myanmar," terang Sukamta.

Lebih lanjut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini saat ini melihat, sangat dibutuhkan campur tangan komunitas internasional. Apalagi krisis di Myanmar ini bisa bertambah pelik dengan masuknya permasalahan konflik etnis.

"Jika isu bergeser dari masalah kudeta dan pembantaian warga sipil kepada isu konflik etnis, tentu akan lebih menyulitkan bagi ASEAN untuk



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Para pemimpin ASEAN tidak boleh tinggal diam, harus ada upaya konkret untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. Usul Pak Jokowi untuk diadakan KTT ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar sudah tepat, mestinya hal ini segera diwujudkan apalagi beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Brunei menghendaki bisa diselenggarakan di Jakarta sebagai Sekretariat ASEAN

campur tangan. Itu sebabnya KTT ASEAN harus segera diwujudkan. Ini juga akan menjadi desakan lebih kuat

kepada PBB dan komunitas internasional lainnya melakukan tindakan konkrit atasi krisis Myanmar." tutup Sukamta.

SP3 BLBI, Anggota FPKS: Ini **Efek dari Revisi** Undang-Undang KPK

KUTIPAN

Jakarta (16/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Achmad Dimiyati Natakusumah, menanggapi pemberhentian penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim.

Dalam acara PKS Legislative Corner, Dimiyati mengatakan bahwa kejahatan korupsi itu tergolong extraordinary crime, yang memang sudah jauh hari direncanakan.

Jadi korupsi itu sudah mulai direncanakan sejak mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pemeriksaan hingga pengawasan. Padahal ini kan pemeriksaan dari BPK sudah jelas dan clear bahwa ada kerugian sekian Triliun," terang Anggota DPR Komisi III DPR RI ini.

Kalau dilihat dari pemeriksaan dan penyidikan, lanjut Dimiyati, kasus ini sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang biasanya sudah cukup bukti, bahwa seseorang diduga terlibat sebuah kasus.

"Biasanya kalau KPK sudah menangani sebuah perkara, biasanya orang sudah 'give up', sudah nyerah dan sudah terbuka bahwa itu sudah memiliki cukup bukti serta memenuhi unsur. Tapi entah mengapa KPK sekarang mengeluarkan SP3. Dan ini

cepat-cepat mengeluarkannya," terang Dimiyati.

Tapi problemnya, imbuh Dimiyati, karena perubahan undang-undang. Undang-undang 19 tahun 2019 ini merupakan UU terbaru KPK yang sejak awal menjadi problem.

"Inilah impact atau tujuan adanya perubahan UU 19 tahun 2019 yaitu adanya SP3. UU KPK direvisi untuk mengeluarkan SP3. Dulu saya masuk dalam panja RUU KPK dengan tegas menolak perubahan UU KPK ini. Saya pingin KPK ini kuat," tegas Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Sebelumnya, KPK menghentikan penyelidikan Kasus BLBI melalui Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021. KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara dalam perkara itu menyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

"Jadi korupsi itu sudah mulai direncanakan sejak mulai perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pemeriksaan hingga pengawasan. Padahal ini kan pemeriksaan dari BPK sudah jelas dan clear bahwa ada kerugian sekian Triliun"

Tahukah Kamu?

BAHWA PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA (17/8/1945)

BERTEPATAN DENGAN 9 RAMADHAN 1364 H

Menjelang persiapan
menuju kemerdekaan,
Soekarno kerap meminta
rekomendasi dari beberapa
Ulama juga kepada
Habib Ali bin Abdurrahman
al Habsyi Kwitang.

Menurut Prof. Ahmad
Mansur Suryanegara dalam
bukunya Api Sejarah Jilid 2.
Tanggal **17 Agustus 1945**
bertepatan dengan tanggal
9 Ramadhan 1364 H

1945	١٣٦٤ هـ	١٣٦٥ هـ
AGUSTUS	١٣٦٤ هـ	١٣٦٥ هـ
1 15	5 12	19 26
2 16	6 13	20 27
3 17	7 14	21 28
4 18	8 15	22 29
5 19	9 16	23 30
6 20	10 17	24 31
7 21	11 18	25
8 22	12 19	
9 23	1 20	
10 24	2 21	
11 25	3 22	
12 26	4 23	



Menurut kesaksian Mr. Achmad
Soebardjo, **"Pukul 03.00 pagi waktu
sahur Ramadhan, teks Proklamasi
didiktekan oleh Bung Hatta, dan
ditulis dengan tangan Bung Karno",**
jelas Prof Mansur.



Hari ini 9 Ramadhan 1442 H

“Tahniah dan Selamat untuk Proklamasi Kemerdekaan
Bangsa Indonesia. Dirgahayu Bangsa dan Negara Indonesia.
Allahu Akbar Merdeka!”

lahan Gambut yang Dijadikan
'Food Estate'

Aleg FPKS: Harus Ada Ketegasan Pemerintah

KUTIPAN

Anggota Komisi IV
DPR RI Andi Akmal
Pasluddin menilai
harus ada ketegasan
dari pemerintah
terkait lahan bekas
gambut yang
dijadikan area food
estate.

la mewanti-wanti agar jangan
sampai nanti nya malah
dijadikan alat bagi oknum untuk
mengubah dan
mengalihfungsikan lahan
menjadi perkebunan sawit.

"Jangan sampai usaha
memaksimalkan lahan gambut
dengan tujuan meningkatkan
produktifitas pertanian kita
nantinya malah kembali
dialihfungsikan untuk kelapa
sawit, dan pada akhirnya malah
pihak swasta dan oknum yang

mengambil banyak manfaat
dari food estate ini. Hal ini tentu
menyimpang dari tujuan awal,"
ujar Akmal di Kalimantan
Tengah, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PKS itu
menambahkan, optimalisasi
lahan-lahan bekas gambut
sudah mulai berjalan, perbaikan
jaringan saluran juga sudah
mulai dijalankan, meski belum
bisa dikatakan maksimal.

Oleh karena itu Akmal
menilai perlu ada ketegasan
dari awal tentang program food
estate yang notabene
menggunakan lahan bekas
gambut ini. Pihaknya berharap
program food estate ini
bermanfaat bagi para petani
kecil kita, masyarakat pertanian
kita. (ayu/es)



**Dr. H. ANDI AKMAL
PASLUDDIN, S.P.,M.M**
Anggota Komisi IV DPR RI

"Jangan sampai usaha memaksimalkan lahan
gambut dengan tujuan meningkatkan produktifitas
pertanian kita nantinya malah kembali
dialihfungsikan untuk kelapa sawit, dan pada
akhirnya malah pihak swasta dan oknum yang
mengambil banyak manfaat dari food estate ini. Hal
ini tentu menyimpang dari tujuan awal"

Aleg PKS Minta Menteri Kelautan dan Perikanan Tangani Kerusakan Mangrove di Indonesia Timur

KUTIPAN

Jakarta (08/04) --- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merencanakan untuk melakukan penanaman mangrove secara regular pada 21 titik di kurun 2021

Mayoritas sebaran pemulihan kawasan mangrove dilaksanakan di Wilayah Barat Indonesia. Rencana ini didukung dengan Alokasi Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 43 Miliar.

Komisi IV DPR RI meminta agar distribusi perhatian KKP untuk pemulihan hutan mangrove juga menyentuh wilayah Indonesia Timur.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyuarakan soal ini dalam rapat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kompleks Gedung DPR RI Senayan Jakarta (08/04).

"Tambahan anggaran Rp

43 Miliar untuk KKP bagi penanaman mangrove jangan hanya terpusat di wilayah Jawa. Laju kerusakan mangrove di luar kawasan hutan wilayah timur Indonesia juga cukup tinggi. KKP seharusnya menyentuh Kawasan -- Kawasan timur tersebut", tegas Saadiah.

Saadiah mengurai, wilayah tengah dan timur tersasar laju kerusakan mangrove antara lain disebabkan karena aktivitas tambang. Kondisi Kawasan mangrove cukup kritis.

"Kawasan mangrove di Kalimantan 11% kritis, Sulawesi 29% kritis, Bali NTB, NTT 32% kritis, Maluku dan Maluku Utara 7,3% kritis. Papua ada 1,6%

pemulihan lebih proporsional untuk membendung alih fungsi hutan mangrove", detail Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Saadiah berargumen, pengelolaan hutan mangrove membentuk ekosistem selain bernilai ekologis, juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Memang benar usaha pengelolaan hutan mangrove melalui penanaman kembali bisa menyerap tenaga kerja sesuai yang dipaparkan oleh KKP.

"Namun istilah padat karya bukan saja pada proses pengerjaannya tetapi harus dilihat dalam sebuah perspektif jangka panjang bagaimana ekosistem mangrove ini memberikan dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat pesisir", kata politisi perempuan asal Maluku.

Pengelolaan hutan mangrove menurut Saadiah, merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang diinisiasi pemerintah.

"Tak heran jika kemudian menteri KKP ikut mencanangkan intensifikasi tambak udang di wilayah hutan mangrove yang tujuannya agar Indonesia menjadi produsen udang terbesar di dunia", buka Saadiah.

Walaupun menurutnya, pencanangan intensifikasi tambak udang yang digagas oleh Menteri KKP akan menimbulkan tanda tanya lanjutan tetap model dan rencana untuk mewujudkannya.



SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Pengelolaan hutan mangrove menurut Saadiah, merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang diinisiasi pemerintah. Tak heran jika kemudian menteri KKP ikut mencanangkan intensifikasi tambak udang di wilayah hutan mangrove yang tujuannya agar Indonesia menjadi produsen udang terbesar di dunia"

Aleg PKS Minta Pemerintah Serius dan Konsisten Bahas RUU Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

KUTIPAN

Jakarta (06/05) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menegaskan agar pemerintah lebih serius dalam pembahasan RUU Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSAE)

terutama dalam hal advokasi kepada Presiden agar kejadian pembahasan RUU ini pada periode 2014-2019 lalu tidak terulang lagi.

Johan mengingatkan pemerintah sudah mengeluarkan Surpres R-14/Pres/03/2018 untuk melakukan pembahasan RUU ini namun pada tanggal 4 April 2018 pemerintah pula yang secara resmi menghentikan proses revisi RUU ini.

Hal ini ditegaskan Johan selaku juru bicara dari Fraksi PKS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama para Sekjen Kementerian dari mitra kerja Komisi IV DPR RI pada hari Selasa (06/04) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politisi PKS ini berharap

dengan Kembali ditetapkannya revisi UU KSDAE pada prolegnas prioritas 2021 dapat segera diselesaikan untuk mengatasi berbagai persoalan kekinian dan tantangan ke depan supaya terdapat kepastian hukum dan arah yang jelas terhadap perlindungan keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

"Saya minta pemerintah lebih serius dan konsisten melakukan pembahasan RUU ini sebab sebelumnya pemerintah terlihat kurang serius karena pernah melayangkan surat ke DPR untuk tidak memasukkan RUU KSDAE ini dalam Prolegnas 2020-2024 serta pernah ada arahan Presiden untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU

ini," tegas Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mengungkapkan salah satu aspek krusial pentingnya dilakukan revisi UU No.5/1990 ini adalah adanya fakta banyak hewan asli Indonesia yang tercatat sebagai hewan yang terancam punah akibat dari deforestasi, perburuan liar dan penghilangan habitat hewan tersebut.

Johan mencontohkan berkurangnya populasi Komodo secara signifikan yaitu lebih dari 50%, terus berkurangnya populasi Burung Maleo, populasi Babirusa serta populasi Anoa yang saat ini hanya berjumlah 285 populasi.

"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi hewan langka tersebut lima tahun ke depan, jika tidak ada perlindungan ekstra terhadap hewan langka tersebut," ujar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini menyebutkan saat ini terdapat 6.747 desa yang berada di sekitar Kawasan Konservasi dengan jumlah masyarakat yang mencapai 16,3 juta jiwa.



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya minta pemerintah lebih serius dan konsisten melakukan pembahasan RUU ini sebab sebelumnya pemerintah terlihat kurang serius karena pernah melayangkan surat ke DPR untuk tidak memasukkan RUU KSDAE ini dalam Prolegnas 2020-2024 serta pernah ada arahan Presiden untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU ini,

"Diperlukan pengaturan secara khusus mengenai kemitraan konservasi agar semakin banyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari kemitraan konservasi supaya kesejahteraan mereka meningkat dari sisi sosial ekonomi," tutur Johan.

Johan memaparkan bahwa Indonesia dikenal sebagai 'Mega Biodiversity Country' karena telah teridentifikasi memiliki 133.693 spesies yang sangat unik dan beranekaragam.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bela Petani Jeruk, Anggota FPKS **Kritik Pemerintah** yang Masih Banjiri Pasar dengan Jeruk Import

KUTIPAN

Jakarta (14/04) — Legislator PKS asal Sukabumi, Slamet minta pemerintah segera menghentikan importasi hortikultura pada komoditas jeruk yang telah memukul petani jeruk di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Bandung Barat.

Pasalnya ketika mengawali masa reses ke Daerah, Slamet, langsung mendapat keluhan petani jeruk yang akibat jeruk impor masuk tanah air, telah merusak harga di pasaran hingga tersisa seperlima harga biasanya.

"Keluhan Petani jeruk kali ini sangat mengharukan. Kita bisa merasakan bagaimana harga jeruk yang biasa di beli perusahaan minuman seharga 35 ribu rupiah, kini cuma dihargai 7 ribu rupiah. Rezaime impor ini mesti segera sadar akan tujuan awal memimpin negara ini untuk berpihak pada rakyat kecil dan termasuk petani dan meminimalisir kebijakan impor pangan,

termasuk impor produk hortikultura", urai Slamet.

Politisi PKS ini mengingatkan kembali akan komitmen pimpinan Negara. Ia menyebut, Jokowi harus komitmen dengan ucapannya, bahwa dia benci dengan produk asing. Pemerintah mesti segera menyelaraskan antara harapan dan kenyataan.

"Jangan bilang Benci Impor, tapi perijinan dan segala sesuatu mempermudah impor pangan malah dipermudah. Ini ujungnya yang sengsara rakyat kecil", ketus Slamet.

Anggota DPR yang bermitra dengan kementerian pertanian ini udah kerap kali mengingatkan baik dalam forum resmi

rapat kenegaraan di DPR maupun pada forum-forum diskusi publik, agar negara ini selalu menyeimbangkan keputusan impor dengan realitas di lapangan. Di lapangan para petani jeruk akhirnya membiarkan produknya membusuk di kebun tak terpanen akibat sulit menemukan kenyataan produknya tidak dihargai dengan layak.

"Kalo pemerintah saja sudah tidak mau melindungi petani kita, lantas tugas pemerintah dimana?", kata Slamet mempertanyakan.

Kini para petani jeruk banyak yang resah akibat jeruknya meragukan untuk laku di pasar. Selain keresahan anjloknya harga, mereka ini mengeluh hasil panen jeruknya tidak ada yang membeli.

Seorang petani yang biasanya berpendapatan 24 juta dari 4 ton jeruk, kini mereka bukan saja menghadapi kenyataan harga terendah 7 ribu rupiah, bahkan menghadapi tidak lakunya jeruk di pasaran.

"Pemerintah mesti segera merubah kebijakan impor



drh. H. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI

"Pemerintah mesti segera merubah kebijakan impor Hortikultura ini. Saya sangat mengkhawatirkan prediksi Bappenas bila kebijakan impor ini terus di biarkan. Profesi Petani Indonesia akan hilang atau sangat minim dengan jumlah penduduk hampir 300 juta ini

Hortikultura ini. Saya sangat mengkhawatirkan prediksi Bappenas bila kebijakan impor ini terus di biarkan. Profesi Petani Indonesia akan hilang atau sangat minim dengan

jumlah penduduk hampir 300 juta ini. Padahal, potensi sumber daya alam negara ini lebih dari cukup untuk di kelola demi memenuhi kebutuhan dalam negeri", tutup Slamet.

Politisi PKS Minta Bulog Optimal Serap Beras Petani untuk Pasar Komersial

KUTIPAN

Jakarta (14/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Bulog Sumatera Barat menyerap beras petani lokal sebanyak-banyaknya

di musim panen raya sekarang ini untuk kemudian dijual secara komersial. Langkah tersebut penting agar harga beras tidak jatuh saat panen raya.

"Stabilitas harga penting guna menjamin kesejahteraan petani. Sebaliknya, harga yang turun apalagi jatuh tentu akan sangat memukul petani," ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Menurutnya, petani itu produsen pangan bangsa Indonesia. "Mereka harus

dibuat senang agar tetap bersemangat mengelola usaha taninya untuk mencukupi pangan bangsa Indonesia. Dengan demikian pangan kita tidak terlalu tergantung pada impor," tutur legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto juga meminta Bulog agar menyediakan dan menjaga stok pangan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri dalam jumlah yang cukup dengan harga yang stabil.

"Hal ini penting agar kaum muslimin bisa tenang dalam menjalani berbagai ibadah sepanjang bulan Ramadhan. Tidak terganggu oleh kenaikan harga pangan," paparnya.

Belum lama ini rombongan Komisi IV DPR berkunjung ke Gudang Bulog Sumatera Barat di Rawang, Kota Padang.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR meninjau stok beras di gudang tersebut dan menemukan masih tersimpan beras impor tahun 2018.

Komisi IV meminta beras impor 2018 itu segera disalurkan agar tidak mengalami turun mutu.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Petani itu produsen pangan bangsa Indonesia. "Mereka harus dibuat senang agar tetap bersemangat mengelola usaha taninya untuk mencukupi pangan bangsa Indonesia. Dengan demikian pangan kita tidak terlalu tergantung pada impor,"



Mohon Doa Restu

19 Tahun PKS

#CintaPKSUntukINDONESIA

20 April 2002 - 20 April 2021

*Bersama
Melayani
Rakyat*



Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Aleg PKS Komisi V Minta Pemerintah **Tidak Beban Rakyat** dengan Kenaikan Tarif Tol

KUTIPAN

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengingatkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait penyesuaian tarif tol yang selalu naik dengan sehingga membebani masyarakat.

Tasikmalaya (16/04) — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengisyaratkan akan ada penyesuaian tarif 29 jalan tol tahun ini.

Penyesuaian tarif jalan tol tersebut menguusi keputusan dari Menteri PUPR, namun BPJT sudah memastikan bahwa penyesuaian tarif tol akan mengacu pada laju inflasi.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mengingatkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait penyesuaian tarif tol yang selalu naik dengan sehingga membebani masyarakat.

"Pada setiap kesempatan PKS selalu menyampaikan penyesuaian tarif jalan tol belum saatnya dilakukan karena Indonesia masih dalam

suasana krisis pandemi,"kata Toriq.

Menurutnya, penggunaan kata penyesuaian sesungguhnya adalah kenaikan tarif. Kenaikan tarif tol pasti akan berimbas pada kenaikan biaya logistik, tentu hal ini akan membebani masyarakat pelaku ekonomi.

"Kenaikan tarif tol kerap menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah sopir bus dan truk yang menggunakan ruas jalan tol mengaku kenaikan tarif tol yang dilakukan secara periodik, terlebih disaat pandemi sangat membebani karena penghasilan mereka berkurang", ungkap Toriq

Toriq pun mengingatkan kepada pengelola jalan tol tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang belum terpenuhi pada beberapa ruas jalan tol.

"Dari hasil evaluasi SPM oleh BPJT, masih ditemukan beberapa ruas tol yang tidak memenuhi SPM, hal ini terkait kondisi jalan serta keselamatan pengguna jalan tol," imbuhnya.

Ia menekankan agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dapat meninjau kembali kenaikan tarif jalan tol serta transparan dalam mempublikasikan evaluasi SPM. Hal itu penting dilakukan supaya masyarakat pengguna mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dasar kenaikan tarif tol tersebut.

Karenanya, Toriq meminta BPJT dan Kementerian PUPR tidak asal menaikkan tarif, khususnya untuk kendaraan logistik.

"Kalaupun terpaksa naik, untuk angkutan umum dan kendaraan logistik tidak naikan. Saat pandemi seperti ini, harusnya tidak menambah beban rakyat" katanya.



KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Kenaikan tarif tol kerap menjadi keluhan masyarakat. Sejumlah sopir bus dan truk yang menggunakan ruas jalan tol mengaku kenaikan tarif tol yang dilakukan secara periodik, terlebih disaat pandemi sangat membebani karena penghasilan mereka berkurang"

Legislator PKS: Esensi Pelarangan Mudik Bukan pada Perpindahan Orang, tapi **Penyebaran Virus**

KUTIPAN

Jakarta (09/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menanggapi pelarangan mudik lebaran 2021, yang akan dimulai pada 6-17 Mei 2021, dan berlaku untuk semua orang yakni ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Menurut Suryadi, Keputusan larangan mudik Lebaran ini diambil dengan mempertimbangan masih tingginya angka penularan virus Corona secara Nasional.

"Apalagi, belajar dari momentum-momentum libur panjang beberapa waktu lalu, yang terbukti berkorelasi dengan peningkatan angka penularan virus Corona, dimana pada libur Agustus jumlah kasus meningkat 119%, libur Oktober 95%, dan Natal-Tahun Baru 78%," ungkapnya.

Sehingga, lanjut pria yang akrab disapa SJP ini, pelarangan mudik dimaksudkan agar upaya vaksinasi yang sedang

dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan, mengingat program vaksinasi diberlakukan akan selesai pada tahun 2022.

"Sehingga, sebelum program ini selesai segala upaya untuk mencegah penularan harus tetap dilakukan," tambahnya.

Walaupun detail aturan terkait larangan mudik ini belum keluar dari Satgas Covid-19, katanya, Kementerian Perhubungan sendiri telah merencanakan akan menyiapkan lebih dari 300 titik lokasi penyekatan untuk mencegah kegiatan mudik masyarakat.

"Sayangnya pelarangan ini hanya berlaku antar provinsi saja, sebagaimana dikatakan Dirlantas Polda Jateng yang menyatakan bahwa penyekatan hanya berlaku antar provinsi. Sehingga masyarakat Jawa Tengah masih diperbolehkan melakukan perjalanan mudik antarkota dan kabupaten," terang Suryadi.

Suryadi menambahkan, pihaknya berpendapat seharusnya pengetatan dilakukan di semua wilayah tetapi dengan tujuan menegakkan protokol kesehatan.

"Sehingga tempat-tempat wisata yang telah diperbolehkan untuk tetap dibuka oleh Pemerintah terjamin keamanannya dari penyebaran wabah Covid19. Sebab esensi dari pelarangan mudik seharusnya lebih ditekankan pada pencegahan penyebaran virus akibat adanya perjalanan orang," terang SJP.

Atas hal tersebut, Anggota DPR dari Dapil NTB ini meminta Pemerintah segera mengeluarkan aturan detail tentang larangan mudik, serta berharap Pemerintah konsisten



H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat II

"Seharusnya pengetatan dilakukan di semua wilayah tetapi dengan tujuan menegakkan protokol kesehatan. sehingga tempat-tempat wisata yang telah diperbolehkan untuk tetap dibuka oleh Pemerintah terjamin keamanannya dari penyebaran wabah Covid19"

dan berusaha keras menegakkan protokol kesehatan tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

"Sehingga diharapkan

ekonomi dapat tetap berjalan namun penyebaran virus juga dapat ditanggulangi," tutup Suryadi.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin,

Anggota FPKS: **Prioritaskan** Penempatan Pelaku UMKM pada Rest Area

KUTIPAN

Padang (08/04) — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina menanggapi pelaksanaan pembangunan Proyek Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin

ketika kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI dengan PT Hutama Karya (Persero) di Sumatera Barat meminta agar para pelaku UMKM diberikan porsi strategis pada rest area yang akan di bangun sepanjang jalan Tol ini.

"Saya Minta UMKM ini nantinya mendapat tempat strategis di setiap rest area yang di bangun sepanjang jalan Tol. Ini akan menjadi etalase yang sangat bagus mencitrakan pemerintah sangat berpihak pada UMKM dan rakyat kecil. Sehingga para pelaku UMKM tidak perlu bersaing dengan para pengusaha besar yang bila ini dibiarkan pasti para pelaku UMKM akan terpinggirkan", ujar Nevi.

Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 yang diikuti

politisi PKS ini merupakan fungsi pengawasan proyek besar pemerintah yang sangat strategis bagi proses percepatan pembangunan. Jalan tol Padang-Sicincin ini merupakan bagian dari jalan tol Padang-Pekanbaru yang mempunyai panjang total 254 kilometer dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru.

"Saya agak menyayangkan, bahwa Proyek besar ini agak melamban. Sudah dimulai dari awal 2018, Namun hingga saat ini yang bebas baru 5 kilometer dari panjang proyek jalan tol Padang-Sicincin sepanjang 36,2

kilometer", ucap Nevi.

Namun Anggota Komisi VI ini menyadari adanya Kendala pengerjaan tol akibat pembebasan lahan yang sangat lambat. Ditambah lagi, beban utang BUMN sudah terlampaui tinggi, tren ini juga terus meningkat sejak beberapa tahun terakhir.

"Saya berharap, dengan sumber pendanaan berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) serta alternatif pendanaan melalui creative financing seperti pinjaman perbankan nasional dan multinasional hingga penerbitan obligasi, Jalan tol Padang-Sicincin dapat segera terealisasi. Saya juga berharap agar hendaknya jalan tol padang sicincin ini selesai sesuai jadwal yang direncanakan, agar dapat meningkat pertumbuhan ekonomi setelah pandemi", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Saya Minta UMKM ini nantinya mendapat tempat strategis di setiap rest area yang di bangun sepanjang jalan Tol. Ini akan menjadi etalase yang sangat bagus mencitrakan pemerintah sangat berpihak pada UMKM dan rakyat kecil. Sehingga para pelaku UMKM tidak perlu bersaing dengan para pengusaha besar yang bila ini dibiarkan pasti para pelaku UMKM akan terpinggirkan"

Aleg PKS: Buruknya Perencanaan Pembangunan Penyebab BUMN Infrastruktur Terpuruk

KUTIPAN

Jakarta (06/04) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin menengarai, perencanaan pembangunan infrastruktur yang buruk menjadi penyebab terpuruknya sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur.

Ambisi besar tanpa perencanaan matang, kata Amin, hanya akan membebani keuangan negara dan rendahnya kualitas hasil pembangunan.

Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur IV itu menyoroti amblesnya saham-saham sejumlah BUMN Karya menyusul kinerja sejumlah BUMN Karya yang tak memuaskan, di tengah gencarnya proyek infrastruktur. BUMN-BUMN tersebut antara lain PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Hutama Karya (HK), PT Wijaya Karya (WIK), PT Waskita Karya (WSKT) dan PT Waskita Beton Precast (WSBP).

Berdasarkan laporan keuangan BUMN Karya pada Selasa (30/03/2021) lalu. PT

Waskita Karya merugi hingga Rp 7 triliun. Sedangkan Wijaya Karya, meski tidak sampai rugi tapi labanya terjun bebas dari Rp 2,2 triliun menjadi kurang dari Rp 200 miliar. Kemudian PT PP turun dari Rp 800 miliar tinggal Rp 128 miliar.

"Dengan tingkat ketahanan yang semakin lemah, Amin mengkhawatirkan akan bergurannya BUMN Infrastruktur karena sulit bertahan terlebih ditengah pandemi. Tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil jalan pintas melegonya ke pihak asing," beber Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, memang betul sektor konstruksi menjadi salah satu sektor paling terdampak

pandemi Covid-19.

Proyek-proyek konstruksi, imbuhnya, terpaksa mangkrak sejak pandemi menghantam Indonesia. Mengingat sektor konstruksi bersifat padat modal, mangkraknya proyek tentu saja menyebabkan kerugian parah.

"Sangat disayangkan pemerintah tidak memiliki exit plan dari situasi tersebut. Beban keuangan BUMN Karya pun berat karena harus membangun usaha yang sangat besar dan harus segera dibayar," kata Amin.

Menurut Amin, kondisi saat ini menjadi alarm bahaya bagi eksistensi BUMN Karya. Membengkaknya utang ditinggalkan kondisi kas perusahaan yang terus menipis berisiko gagal bayar mengingat kondisi ekonomi yang masih berat dan tidak pasti akibat pandemi.

Perencanaan yang buruk juga mendorong BUMN berutang dalam jumlah besar karena tidak mudah menyipikan dana sangat besar dalam waktu singkat. Amin menyontohkan pembangunan 24 ruas jalan tol Trans

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Dengan tingkat ketahanan yang semakin lemah, Amin mengkhawatirkan akan bergurannya BUMN Infrastruktur karena sulit bertahan terlebih ditengah pandemi. Tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil jalan pintas melegonya ke pihak asing"

Sumatera sepanjang 2.987 kilometer berdampak pada defisitnya pendanaan PT Hutama Karya (Persero) sebagai kontraktor. Jumlahnya mencapai hingga Rp 60 triliun.

Hingga akhir tahun 2020, Hutama Karya telah mengerjakan delapan ruas tol dengan panjang 1.156 kilometer. Sekitar 513 kilometer

jalan tol beroperasi, namun sisanya, sepanjang 643 kilometer terancam mangkrak.

"BUMN Karya harus diselamatkan. Kami nantikan realisasi janji pemerintah yang akan menyelesaikan persoalan pendanaan proyek infrastruktur lewat lembaga pengelola investasi yang sudah dibentuk," pungkasnya.



INDONESIA JAUH TERTINGGAL DI INDEKS INOVASI GLOBAL 2020

PKS: Stop Eksperimentasi Kelembagaan Ristek, Pemerintah harusnya secara serius mengembangkan ristek menjadi motor penggerak pembangunan.

■ Indeks Inovasi Global (GII) 2020 mencatat Indonesia



Peringkat
85 dari **131** Negara
sejak 2018

■ Peringkat di **ASEAN**.

-  7. Indonesia
-  8. Kamboja
-  9. Laos
-  10. Myanmar

■ Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Timur dan Oceania, Indonesia menduduki peringkat **14** dari **17** negara.

■ Indeks Inovasi Global (GII) 2020 mengukur tingkat inovasi sebuah negara dalam 7 poin yakni, **Institusi, SDM dan riset, infrastruktur riset, kecanggihan berusaha, kecanggihan pasar, output IPTEK output kreatifitas.**

■ Dari ketujuh poin tersebut peringkat Indonesia tertinggal jauh dalam hal **institusi (111), kecanggihan berusaha (114) dan SDM riset (92).**



Aleg PKS Tegas Tolak Rencana Penyesuaian Tarif Listrik

KUTIPAN

Jakarta (12/04) — Rencana Pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik,

mendapat kecaman dari DPR. Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto, menilai rencana menaikkan tarif dasar listrik di saat pandemi ini sangat tidak berperasaan.

Menurut Mulyanto, saat ini kegiatan ekonomi masyarakat belum pulih benar, sehingga tidak seharusnya Pemerintah melalui PLN berencana menaikkan tarif dasar listrik.

"PKS menolak tarif adjustmen. Mau pakai istilah apapun kalau ujung-ujungnya akan memberatkan masyarakat akan kami tolak," tegas Mulyanto.

Dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, kata Mulyanto, yang perlu dilakukan Pemerintah dan PLN adalah perpanjangan stimulus listrik bagi masyarakat dan UMKM yang membutuhkan. "Bukan

malah menaikkan tarif listrik," jelasnya.

Mulyanto heran kenapa Pemerintah dan PLN berpikir dengan logika yang terbalik. Di saat masyarakat sedang kesulitan menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah bukannya mengurangi malah berniat menambah beban masyarakat.

"Seharusnya, selama ekonomi dan daya beli masyarakat masih lemah, maka negara harus bahu-membahu membantu meringankan beban dan mendorong meningkatkan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, harga listrik yang terjangkau, yang ditopang oleh biaya kompensasi dari Pemerintah, adalah salah satu instrumen untuk itu.

"Menurut saya, bicara soal kenaikan tarif listrik di saat pandemi masih merebak seperti sekarang ini, sungguh melukai hati masyarakat. Tidak ada rasa welas asih", tandas Mulyanto.



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

"Seharusnya, selama ekonomi dan daya beli masyarakat masih lemah, maka negara harus bahu-membahu membantu meringankan beban dan mendorong meningkatkan ekonomi masyarakat. harga listrik yang terjangkau, yang ditopang oleh biaya kompensasi dari Pemerintah, adalah salah satu instrumen untuk itu. Menurut saya, bicara soal kenaikan tarif listrik di saat pandemi masih merebak seperti sekarang ini, sungguh melukai hati masyarakat. Tidak ada rasa welas asih",

Terkait Mensos yang Tak Usulkan Perpanjangan Bansos Tunai, HNW: **Harusnya Berpihak pada Rakyat!**

KUTIPAN

Jakarta (12/04) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi ketidakbijakan disaat rakyat miskin bertambah dan darurat nasional covid-19 belum landai

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersikeras tidak memperpanjang bantuan tunai untuk warga.

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, bahkan sikap Mensos diungkapkan Direktur Anggaran bidang PMK di Kemenkeu yang tidak mengajukan usulan perpanjangan bantuan sosial tunai yang akan selesai pada bulan April.

"Padahal Direktur Anggaran bidang PMK Kementerian Keuangan menyatakan siap mengkaji kecukupan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk memperpanjang bansos tunai apabila diusulkan oleh Kementerian Sosial," ungkap HNW.

Keengganan Mensos untuk memperjuangkan

program tersebut, imbuhnya, juga mencederai sejarah Kementerian Sosial yang sejak awal dibentuk pada 19 Agustus 1945 adalah dalam rangka menyalurkan bantuan sosial bagi rakyat miskin pasca kemerdekaan.

Dan sekarang, terang HNW, akibat covid-19, Rakyat miskin bukannya berkurang dari tahun 2020, justru bertambah sebanyak 2,7 juta orang menurut BPS per Februari 2021.

"Sangat disayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi Rakyat miskin, bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun

belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bantuan sosial tunai. Hal yang ditolak oleh para Warga sebagaimana mereka sampaikan aspirasinya ke saya saat reses. Mestinya Mensos memaksimalkan perjuangan untuk mendapatkan anggaran itu dengan mengajukan program perpanjangannya ke Kemenkeu, yang ternyata masih membuka peluang untuk penyiapan anggaran bantuan tunai tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Anggaran bidang PMK Kemenkeu," terang Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (12/04).

Hidayat yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII sebagai mitra Kementerian Sosial ini menyalskan sikap Mensos Risma yang enteng saja dan terburuburu kembali membuat keputusan sepihak menghentikan program bantuan sosial dengan alasan ketiadaan anggaran.

"Tapi Bu Mensos sebagaimana dilaporkan oleh pihak Direktur Anggaran bidang



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin itu juga perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mampu mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia (57,6%),"

PMK Kemenkeu, bukannya mengajukan usulan program tambahan anggaran, tapi malah sudah membuat keputusan menghentikan program dengan alasan ketiadaan anggaran. Padahal anggaran ada di Kemenkeu, dan pengajuan

usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan," pungkas HNW.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Politisi PKS Dorong Kementerian Agama Tambah Usulan Kuota Formasi Guru Agama PPPK

KUTIPAN

Jakarta (09/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, atau biasa disapa Ustaz Bukhori Yusuf (UBY), mendorong Kementerian Agama untuk memaksimalkan penambahan kuota guru agama dalam rekrutmen PPPK yang akan diselenggarakan tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian Agama telah memperoleh jatah kuota sebanyak 27.303 dari total 1 juta formasi guru PPPK yang disediakan oleh pemerintah.

"Pada 29 Maret 2021 lalu, dalam rapat Komisi X DPR dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) didapat informasi bahwa dari total 1 formasi guru, kuota yang sampai saat ini terisi ternyata baru 523.120. Artinya, masih tersisa kuota kosong yang cukup besar," ungkap Bukhori saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Kamis (08/04/2021).

Lebih lanjut, Anggota Baleb

ini mendesak supaya Menteri Agama bisa mengisi kuota yang masih tersisa banyak tersebut sesuai dengan total jumlah guru agama honorer. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) mencatat, jumlah guru honorer untuk semua agama sebanyak 127 ribu. Jumlah ini adalah mereka yang tercatat telah mengabdikan lebih dari 10 tahun.

"Semestinya Kementerian Agama tidak hanya mengambil 27 ribu. Jika perlu, semua guru agama honorer, khususnya yang telah lama mengabdikan, semuanya dimasukan. Karena itu PKS mendorong Menteri Agama supaya tidak cukup

dengan itu supaya guru agama juga memiliki hak yang sama dengan guru lainnya," usulnya di hadapan Menteri Agama.

Selain itu, Ketua DPP PKS ini juga menyoroti isu kenaikan biaya haji pada tahun 2021. Ia memahami bahwa situasi pandemi akan membawa biaya konsekuensi jika penyelenggaraan haji jadi terlaksana pada tahun ini. Kendati begitu, ia berharap supaya biaya haji sedapat mungkin ditekan supaya tidak memberatkan calon jemaah haji.

"Jika memang terpaksa ada kenaikan, perlu ada alasan rasional maupun solusi dari pemerintah sehingga tidak memberatkan masyarakat," imbuhnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Bukhori juga menyesalkan upaya diplomasi pemerintah Indonesia yang dinilai masih lemah dalam melobi pemerintah Arab Saudi untuk perolehan kepastian haji di tahun ini. Padahal, lanjutnya, pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar lebih terhadap pemerintah Arab Saudi terkait persoalan haji.



KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Semestinya Kementerian Agama tidak hanya mengambil 27 ribu. Jika perlu, semua guru agama honorer, khususnya yang telah lama mengabdikan, semuanya dimasukan. Karena itu PKS mendorong Menteri Agama supaya tidak cukup dengan itu supaya guru agama juga memiliki hak yang sama dengan guru lainnya,

"Arab Saudi lebih butuh Indonesia dalam hal haji, mengingat negara kita adalah penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia," ungkapnya.

Untuk diketahui, pada 23 April 2019, Menteri Agama

Lukman Hakim Saefuddin mengatakan total jemaah haji Indonesia pada musim haji 2019/1440 Hijriah silam menjadi yang terbesar di dunia, yakni sebesar 231 ribu orang. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

19

Tahun PKS

#CintaPKSuntukINDONESIA

20 April 2002 - 20 April 2021

Selamat Hari Kartini 21 April 2021

*Dengan Semangat Ramadhan, Perempuan Bergiat,
Lingkungan Sehat, Ekonomi Kuat*



Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. ● Hj. Nevi Zuairina ● Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Hj. Sakinah Aljufri, S.Ag ● Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T ● Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Saadiah Uluputty, S.T ● Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A

Komisi IX Minta Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan Segera Realisasi JKP

KUTIPAN

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk segera merealisasikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun demikian, Komisi IX mengingatkan realisasi JKP wajib dilaksanakan tanpa mengurangi manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian termaktub dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Lebih lanjut, Ansory menyatakan dalam pelaksanaan Program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang

JKP, Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan dua poin penting. "Poin pertama, Komisi IX mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan perbaikan infrastruktur," tutur politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Termasuk, imbuh Ansory, database kepesertaan sehingga Program JKP dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta. Poin kedua, sambung Ansory, Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan segera memberikan time table integrasi data kepesertaan dan kepastian dilaksanakannya program JKP.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziah menjelaskan perkembangan Permenaker yang menjadi aturan turunan PP Nomor 37 tahun 2021 tentang JKP tersebut. Ida menyatakan,

Permenaker tentang Tata Cara Pendaftaran sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat 2 pasal 37 tahun 2021 tengah dalam proses harmonisasi di Kemenkumham. Proses yang sama tengah dilakukan untuk Permenaker tentang Rekomposisi Iuran.

PP nomor 37 tahun 2021 ini juga mengamanatkan Kemenkeu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ida mengungkapkan, valuasi iuran dan batas atas yang ditetapkan dengan PP. Dengan adanya PP tentang penyelenggaraan JKP ini, maka akan ada pula revisi terhadap PP 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program JKK dan JKM. Serta, PP 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial.

"Revisi atas PP 44 tahun 2015 ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Sementara, revisi atas PP 55 tahun 2015 sedang dalam proses finalisasi. Tak hanya itu, adanya aturan tentang JKP ini mengharuskan BPJS Ketenagakerjaan melakukan integrasi data kepesertaan dengan BPJS Kesehatan paling lama 6 bulan sejak PP 37/2021 berlaku," papar Menaker. (pun/sf)



H. ANSORY SIREGAR, Lc,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Dalam pelaksanaan Program JKP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP, Komisi IX meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan dua poin penting. "Poin pertama, Komisi IX mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan segera melakukan perbaikan infrastruktur, Termasuk database kepesertaan sehingga Program JKP dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta"

Wakil Ketua FPKS **Kritik Keras** Dibukanya Tempat Wisata saat Pelarangan Mudik

KUTIPAN

Jakarta (14/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, mengkritik keras kebijakan Pemerintah yang membuka destinasi wisata namun melarang masyarakat untuk mudik.

"Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan? Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan 'membandel' untuk tetap mudik" kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (13/04/2021).

Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus Covid-19 Indonesia masih tinggi.

Data per Minggu, 11 April kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang. Menurut Netty, jika memang pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka seharusnya tempat wisata

jangan dibuka.

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut. Apakah ini yang diinginkan oleh pemerintah terjadi kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata? Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi COVID-19 juga masih berjalan lambat" katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa hingga Senin (05/04/2021) Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin.

Pemerintah dalam keterangan medianya juga menyebut pembukaan wisata

akan tetap memerhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi, bagi perempuan politisi PKS Netty Prasetyani sangat sulit menerapkan prokes di tempat-tempat wisata.

"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prosesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak" katanya.

Menurut Netty kebijakan pembukaan tempat wisata ini justru akan sangat membebani pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah akan sangat disulitkan karena kita tahu keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemda untuk menjaga tempat wisata. Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes. Hal itu sangat sulit, karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak" kata Netty mengakhiri.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si
Anggota Komisi IX DPR RI

“Pemerintah daerah akan sangat disulitkan karena kita tahu keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemda untuk menjaga tempat wisata. Saya pribadi tidak yakin seluruh tempat wisata bisa diawasi agar tetap menjalankan prokes. Hal itu sangat sulit, karena tidak mungkin satu petugas menjaga satu wisatawan agar tetap menjaga jarak”

Beredar Masker Medis Palsu, Aleg PKS: Pemerintah Harus Tegas, Warga dan Nakes Wajib Dilindungi

KUTIPAN

Jakarta (06/04) — Anggota Komisi IX DPR F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah untuk bertindak tegas terhadap peredaran masker medis palsu maupun yang tidak sesuai standar yang semakin meresahkan.

Pasalnya, masker medis tersebut merupakan masker respirator yang digunakan oleh tenaga kesehatan saat menangani pasien Covid-19.

Sebuah laporan mempublikasikan temuan sejumlah masker yang beredar di masyarakat menunjukkan filtrasi masker berada di bawah standar yang disyaratkan. Selain itu ada laporan sebuah RS rujukan Covid-19 mendapatkan donasi masker respirator N95 yang dipalsukan.

Pada kasus masker tanpa izin edar, terjadi pada temuan ribuan bahkan jutaan masker palsu yang diproduksi di Batam, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Sidoarjo, Jatim pada awal tahun 2020.

Ironinya, masker palsu maupun masker yang tidak sesuai standar medis tersebut beredar dengan bebas di pasar daring maupun luring. Sejumlah distributor bahkan mengklaim produk tersebut dapat digunakan oleh Tenaga Kesehatan. Padahal, berdasarkan penelusuran terungkap bahwa masker respirator yang dijual tersebut memiliki kualitas yang rendah dan justru dapat membahayakan pemakainya.

"Ini tidak bisa dibiarkan, saya sangat menyayangkan kejadian ini, di saat seperti ini seharusnya kita saling melindungi. Saya berharap pemerintah dan kepolisian bertindak tegas atas kejadian ini. Jangan sampai masyarakat

apalagi nakes terlanjur membeli masker palsu yang justru berbahaya bagi mereka," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Yang lebih ironi adalah masih banyak fasilitas kesehatan yang tidak menyediakan masker respirator sesuai kebutuhan tenaga kesehatan. Banyak tenaga medis Indonesia yang menangani pasien Covid-19 dengan menggunakan masker yang dibeli secara mandiri dan sebagiannya terpaksa membeli masker murah yang tidak sesuai standar.

"Saya sangat sedih dan miris mendengar jika ada Faskes yang tidak menyediakan masker sehingga Nakes harus membeli secara mandiri. Kemana perginya dana APBN untuk penanganan Covid-19? Masker adalah alat perlindungan diri paling krusial bagi tenaga kesehatan, seharusnya Pemerintah memberikan subsidi kepada fasilitas kesehatan baik tingkat I maupun tingkat atas," tutur Mufida.

Menurut Mufida, seluruh fasilitas kesehatan harus



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

"Tenaga Kesehatan adalah garda terdepan kita dalam melawan Covid-19, melindungi mereka adalah tanggung jawab kita semua khususnya" pemerintah yang berwenang.

Sudah banyak sekali nakes yang berguguran karena terpapar virus, dan itu harus kita cegah apapun konsekuensinya dan berapapun biaya yang diperlukan"

mendapatkan bantuan atau subsidi masker yang sesuai standar. Karena semua tenaga kesehatan baik yang bertugas di Fasilitas Kesehatan tingkat I seperti klinik dan Puskesmas

hingga yang bertugas mengobati pasien Covid-19 memiliki risiko masing-masing untuk terpapar Covid-19.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

#RUANG ALEG

BY HUMAS FRAKSI PKS

Program terbaru dari Fraksi PKS DPR RI yang memperlihatkan kepada publik kehidupan Anggota Legislatif PKS dibalik kegiatan politik dan mengajak masyarakat untuk merasakan kehangatan obrolan santai bersama para Wakil Rakyat.

Hadir setiap pekan
Sabtu, pukul 10.00 WIB
hanya di:

 youtube **PKSTV DPR RI**



Lupa Cantumkan Pancasila & Bahasa Indonesia jadi Kurikulum,

Aleg PKS: Pentingnya Baca Sebelum Teken Aturan

KUTIPAN

Semarang (16/04) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah lebih teliti sebelum mengesahkan peraturan seperti yang terjadi dalam penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Kurikulum wajib Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hilang dalam kurikulum pendidikan tinggi di PP No.57 tahun 2021, padahal sudah diatur dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," ungkap Fikri disela masa reses DPR RI, Jumat (16/04).

Lebih lanjut Fikri meminta pemerintah membaca ulang Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sudah mengatur kurikulum wajib di universitas.

"Pasal 35 ayat (3) menyebutkan kurikulum perguruan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah, yakni : agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia," urai

politisi PKS ini.

Namun diketahui, ternyata di dalam PP no.57/2021 terutamanya pasal 40 ayat (3) menyebutkan hanya tiga (3) mata kuliah wajib yang ada dalam Kurikulum pendidikan tinggi yakni: (1) pendidikan agama; (2) pendidikan kewarganegaraan; dan (3.) bahasa.

"Saya menduga ada yang lupa membaca Undang Undang sebelum PP ini terbit, padahal posisi UU itu ada di atas PP," ujar Fikri.

Karenanya, Fikri, menekankan perlunya pemerintah membaca atau minimal mengharmonisasi peraturan sebelum diterbitkan.

Dugaan tersebut diperkuat

dengan adanya pers rilis yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Siaran pers tersebut antara lain menyebutkan, secara hukum UU NO.12/2012 tetap berlaku.

"Sehingga mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia tetap menjadi mata kuliah wajib di jenjang pendidikan tinggi," bunyi pers rilis tersebut.

Namun demikian, Fikri menegaskan, Siaran pers saja tidak bisa menggugurkan ketentuan regulasi yang sudah diteken, PP ini harus direvisi!

Hal itu dikarenakan PP 57/2021 tidak hanya mengatur jenjang pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan konsideran UU 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, namun juga mengatur jenjang pendidikan tinggi.

"Maka, harusnya juga mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012," pungkas Fikri.



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Saya menduga ada yang lupa membaca Undang Undang sebelum PP ini terbit, padahal posisi UU itu ada di atas PP. Karenanya, pemerintah perlu membaca atau minimal mengharmonisasi peraturan sebelum diterbitkan"

Aleg PKS: Pemerintah Kurang Peduli terhadap Isu Kebudayaan

KUTIPAN

Jakarta (12/04) — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menyoroti kebijakan pemerintah yang kurang peduli terhadap isu-isu kebudayaan.

Sebagai contoh, UU Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan sejak tahun 2017, belum memiliki aturan turunan yang kuat dan berbasis hukum.

“Persoalan besar kita ini adalah peraturan turunan pada UU Pemajuan Kebudayaan. Ini berbeda sama sekali dengan UU Cipta Kerja yang cepat sekali keluar peraturan turunannya” ungkap Ledia Hanifa saat menerima aspirasi dari Koalisi Seni di Jakarta, Selasa (13/4).

Hal lain yang disoroti Ledia adalah mengenai strategi kebudayaan. Di kalangan internal pemerintah sendiri, penerapannya masih belum konkrit. Di Dirjen Kebudayaan, menurut Ledia, belum ada kebijakan yang secara jelas mengintegrasikan pendidikan, teknologi dengan kebudayaan.

“Di Dirjen Kebudayaan, kenapa tidak ada lagi sekarang, semacam dorongan untuk

pengetahuan tentang kebudayaan di sekolah. In iken domainnya mereka, tapi ketika di bagian kebudayaan seolah-olah itu lepas” ujar Ledia Hanifa yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.

Ledia juga menyoroti sikap pemerintah yang masih kurang peduli terhadap para pelaku kebudayaan. Banyak para budayawan dan seniman yang mengalami kesulitan akibat situasi pandemi Covid-19. Sayangnya, mereka tidak dapat memperoleh bantuan yang maksimal lantaran data mereka tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Di sisi lain, mereka juga tidak dapat memperoleh manfaat dari Kartu Prakerja. Hal ini karena penghasilan mereka yang bersifat harian sulit untuk masuk ke dalam kriteria. Padahal, pemulihan

bisnis pariwisata yang menjadi sumber penghasilan para pelaku kebudayaan akan berlangsung lebih lama “Salah satu solusinya, pemerintah harus memaksimalkan dana abadi kebudayaan yang berjumlah Rp. 2 Trilyun berdasarkan APBN 2021.” ujar Ledia Hanifa.

Ini jadi perhatian penting. Karena ada dua pengumuk, ekonomi kreatif, seni pertunjukan. Ini dibawah kebudayaan. Ini nampaknya belum dukuk benar. Knapa sih ga dukuk bareng? Rumit bagi birokrasi, ada anggaran rapat. Hambatannya teknis. Bagaimana kita bagi tugasnya kepada pelaku kebudayaan yang terdampak covid.

Terakhir, Ledia juga berpendapat bahwa birokrasi masih tumpang tindih dalam berbagi wewenang. Padahal, hambatan seperti ini, menurut Ledia adalah hambatan teknis yang bisa diselesaikan dengan dukuk bareng “Misal nih, seni pertunjukan, itu kan bisa ke kebudayaan atau ekonomi kreatif. Tapi kesulitan dukuk bareng karena teknis anggaran. Harusnya sih ini bisa selesai dengan mudah” tutup Ledia



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

“Banyak para budayawan dan seniman yang mengalami kesulitan akibat situasi pandemi Covid-19. Sayangnya, mereka tidak dapat memperoleh bantuan yang maksimal lantaran data mereka tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di sisi lain, mereka juga tidak dapat memperoleh manfaat dari Kartu Prakerja. Hal ini karena penghasilan mereka yang bersifat harian sulit untuk masuk ke dalam kriteria”

Terkait Larangan Jilbab pada Sekolah di Ambon, Aleg PKS: Mengusik Ketenangan Anak Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (11/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes menanggapi tindakan intoleran yang kembali terjadi di dunia pendidikan.

Menurut Fahmy, berita ditolaknya seorang siswi muslimah karena mengenakan seragam berjilbab di SMP Citra Kasih Ambon sungguh mengusik ketenangan kita semua sebagai anak bangsa.

"Pasal 29 UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," ungkap Anggota Komisi X ini.

Fahmy menambahkan jangan pernah ada oknum pejabat yang melarang seorang muslimah berjilbab, karena ia sedang melaksanakan perintah agamanya.

"Apalagi, belum lama berselang, Pemerintah telah mengeluarkan keputusan

tentang seragam di sekolah. Surat Keputusan ini dibuat bersama 3 kementerian sekaligus: Kemendikbud, Kemenag dan Kemendagri. SKB ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah," terang Fahmy.

SKB ini, imbuhnya, mengatur peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan

kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Intinya ada beberapa hal utama yang terkandung dalam SKB tersebut yang ringkasannya sebagai berikut: Pertama, Aturan ini berlaku untuk di sekolah negeri yang dikelola Pemd," ungkapnya.

Kedua, kata Fahmy, siswa berhak memilih berseragam (umum atau keagamaan), Ketiga, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memilih berseragam sesuai ketentuan.

"Keempat, Sekolah tidak boleh memaksa siswa mengenakan seragam sesuai agama atau memaksa melepas seragam sesuai agama dan Kelima Pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan peraturan daerahnya dengan SKB ini selambatnya 30 hari," jelas Fahmy.

Pemerintah, lanjut Fahmy, harus sigap dan cepat menangani masalah yang sensitif ini. Sebagaimana sigap dan lantangya sikap pemerintah menanggapi sekolah di Padang yang mewajibkan seorangan siswi non



Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

"Pemerintah dan para tokoh agama, tokoh adat dan para pimpinan ormas harus proaktif mengajak masyarakat untuk tetap memelihara situasi kondusif."

Islam untuk mengenakan seragam berjilbab. Bila tidak, tentu saja umat Islam akan protes dan menuduh pemerintah diskriminatif, dan SKB tiga menteri itu menjadi tidak berdaya.

"Kita berharap semua pihak menjaga ketenangan dan kedamaian, terutama dalam mensikapi keragaman dan perbedaan diantara kita sesama anak bangsa.

Pemerintah dan para tokoh agama, tokoh adat dan para pimpinan ormas harus proaktif mengajak masyarakat untuk tetap memelihara situasi kondusif. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memang dengan sengaja ingin membuat kegaduhan dan memecah belah kita. Waspadalah..!" tutup Anggota DPR RI asal Dapil Depok dan Bekasi ini.

Tanggapi Pembentukan KemenInves,

Aleg PKS Tegaskan Pemerintah **Harus Hilangkan** Penghambat Investasi

KUTIPAN

Jakarta (15/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menanggapi pembentukan Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, di Jakarta, Kamis (15/04).

“Jika melihat tujuan pembentukan Kementerian Investasi adalah meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, saya kira pembentukan Kementerian Investasi bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan investasi di tanah air,” ujar Anis.

“Kalaupun direalisasikan, kementerian ini hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi saja,” tambahnya.

Anis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyampaikan data bahwa World Economic Forum (WEF) pernah merilis 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia.

“Dari 16 faktor tersebut, korupsi menjadi kendala utama yang sangat mengganggu dan merugikan,” kata Anis.

WEF menempatkan korupsi dengan skor tertinggi, yaitu sebesar 13,8 sebagai faktor utama penghambat investasi di Indonesia.

“Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan pelicin yang dilakukan sejumlah oknum, terutama dalam pengurusan perizinan, mengakibatkan sejumlah dampak serius terhadap investor,” paparnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menjelaskan faktor kedua yang mempengaruhi investasi di dalam negeri adalah inefisiensi birokrasi dengan skor 11,1.

Dilanjutkan dengan akses

ke pembayaran dengan skor 9,2, infrastruktur tidak merata dengan skor 8,8 dan kebijakan tidak stabil dengan skor 8,6 yang melingkupi 5 faktor utama.

Anis juga memaparkan data lain yang terkait dengan posisi Indonesia di dalam ranking Ease of Doing Business dari Bank Dunia (2020) yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari birokrasi. EDBBD menempatkan Indonesia berada di level 73.

“Level yang menunjukkan posisi relative masih rendah,” ungkapnya. Ranking Indonesia selama tiga tahun terakhir relative stagnan, dan masih di bawah negara-negara tetangga di ASEAN. Sebut saja Singapura di posisi ke 2, Malaysia di posisi 12, Thailand di posisi 21, Brunei di posisi 66, dan bahkan Vietnam di posisi 70.

Senada dengan itu, laporan Bank Dunia yang berjudul ‘Global Economic Risk and Implications for Indonesia’, menyatakan Indonesia dinilai berisiko, rumit, dan tak kompetitif.

Hal lain yang menjadi penghambat investasi

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

“Persoalan investasi di Indonesia begitu kompleks, tidak bisa hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan. Pemerintah harus menghilangkan 10 besar faktor penghambat investasi, atau setidaknya hilangkan 5 faktor utama penghambat investasi”

disampaikan Anis adalah factor regulasi yang seringkali tidak terprediksi, inkonsisten, dan saling bertentangan.

Dan alasan yang juga sering kali mengganjal investasi dalam negeri adalah instabilitas pemerintah yang mendapat skor 6,5. Kemudian tarif pajak

yang dirating 6,4. Lalu etos kerja buruh mendapat poin 5,8, regulasi pajak 5,2, dan pajak 4,7. Kelima alasan ini melingkupi 10 besar faktor yang menjadi penghalang perkembangan inflasi di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MEMPERINGATI HARI BUMI

Mari kita wariskan bumi
pada anak cucu dalam
kondisi prima

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

BURT Soroti Layanan Pasien Covid-19 dan Insentif Nakes di RS Manyar Surabaya

KUTIPAN

Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke Provinsi Jawa Timur menyortir pelayanan pasien Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan di Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya (RS Manyar), Jawa Timur.

"Dalam kesempatan ini kami ingin menanyakan bagaimana tren Covid-19 di Surabaya, bagaimana pelayanan RS Manyar bagi pasien Covid-19, dan bagaimana ruang isolasi Covid-19 serta bagaimana tingkat keberhasilan dalam pelayanan tersebut," tanya Hamid di sela-sela pertemuan Tim Kunker BURT dengan jajaran RS Manyar dipimpin Ketua BURT Agung Budi Santoso, di Surabaya, Jatim, Minggu (4/4/2021)

Sementara Anggota BURT Tina Nur Alam F-NasDem menanyakan apakah RS Manyar menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 dan apakah ada ruang khusus untuk menangani pasien Covid-19, serta apakah ruang ICU untuk pasien Covid-19 dan ICU

untuk pasien non-Covid disatukan.

Sedangkan Anggota BURT Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan) mempertanyakan insentif tenaga kesehatan dan kompensasi dari pemerintah bagi rumah sakit yang melayani pasien Covid-19. Menurutnyanya banyak rumah sakit yang tidak jujur. Pasalnya insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) sekitar Rp1,7 triliun yang belum disalurkan.

"Apakah nakes RS Manyar juga dapat insentif dan apakah ada pemotongan? Sampaikan saja kalau memang belum mendapatkan. Belum lagi kompensasi yang dijanjikan pemerintah kepada keluarga pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebesar Rp15 juta, dan untuk rumah sakit sebesar

Rp94 juta. Makanya banyak pasien yang statusnya di-Covid-kan," pungkasan.

Menanggapi pertanyaan Anggota BURT tersebut, Kepala Bagian Keperawatan RS Manyar lin Rokayah menyampaikan bahwa tren kasus Covid-19 di Surabaya sudah terjadi penurunan dan RS Manyar menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19.

"RS Manyar memiliki 30 tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19. Dalam waktu sebulan ini sudah menurun yang biasanya kami merawat pasien Covid-19 full 30 tempat tidur, sekarang tinggal 5 pasien. Dan kami memiliki ruang khusus tersendiri untuk pasien Covid-19, baik itu untuk ruang ICU Covid maupun ICU non-Covid kita bedakan. Demikian pula untuk ruang transisi sebelum pasien dikategorikan positif (Covid)s," jelas lin.

Terkait tentang kejujuran pembiayaan dari pemerintah, lin menyatakan manajemen RS Manyar tidak melakukan pemotongan insentif nakes dan tidak meng-Covid-kan pasien untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah.

"Alhamdulillah dari manajemen kami terkait



Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

Anggota BURT DPR RI

"Dalam kesempatan ini kami ingin menanyakan bagaimana tren Covid-19 di Surabaya, bagaimana pelayanan RS Manyar bagi pasien Covid-19, dan bagaimana ruang isolasi Covid-19 serta bagaimana tingkat keberhasilan dalam pelayanan tersebut,"

pembayaran nakes, kami tidak ikut campur. Jadi insentif langsung masuk ke rekening masing-masing nakes. Di kami juga ada pengawas dari SPI yang mengawasi langsung. Rumah sakit tidak tahu berapa yang didapatkan oleh masing-

masing nakes tersebut," tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menginformasikan bahwa dari bulan Desember 2020 insentif nakes belum turun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

BURT Cek Pelayanan dan Fasilitas RS Delta Surya Sidoarjo

KUTIPAN

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah meminta Rumah Sakit (RS) Delta Surya Sidoarjo, Jawa Timur untuk meningkatkan profesionalisme serta memperhatikan fasilitas dan peralatan di RS agar dapat memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan dan penanganan kesehatan

Sebab, ia menilai RS yang berlokasi dekat dengan Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo ini pasti akan menjadi tempat pertama yang dituju apabila terdapat penumpang yang membutuhkan penanganan darurat.

"Jadi kita melihat Delta Surya ini kan dekat dengan airport, dengan sendirinya akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat kalau ada sesuatu hal terhadap (peserta) Jamkestama. Oleh sebab itu, RS Delta Surya ini harus lebih meningkatkan profesionalisme dan juga meningkatkan situasi dan kondisi dari rumah sakit itu agar memenuhi syarat untuk

penanganan pasien-pasien jamkestama," ujar Dimiyati usai memimpin pertemuan BURT DPR RI dengan manajemen RS Delta Surya dan PT Asuransi Jasindo, di Sidoarjo, Jatim, Minggu (4/4/2021).

Politisi PKS ini pun menjelaskan, selama menjadi salah satu RS rujukan bagi Anggota Dewan, belum ada Anggota Dewan yang komplain mengenai pelayanan RS Delta Surya. Meskipun begitu, BURT DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dimiyati menilai pemeriksaan kondisi dan pelayanan RS untuk Anggota Dewan di Jatim, khususnya RS Delta Surya sangat penting dilakukan, mengingat Jatim juga

merupakan salah satu provinsi yang memiliki anggota legislatif terbanyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

"Kalau menurut saya sejauh ini belum ada ya (Anggota Dewan) yang komplain dengan pelayanan RS Delta Surya. Tapi itu, dengan kunjungan kerja kita ke RS Delta Surya tidak lain karena posisinya ini ada di Sidoarjo dan dekat dengan airport, apalagi Jawa Timur adalah daerah yang memiliki total anggota legislatif terbanyak dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Maka kita akan mengecek kesiapan dari seluruh provider Jasindo," terang Dimiyati

Terkait, aspirasi dari manajemen RS mengenai bantuan untuk pembelian alat kesehatan seperti pemotongan PPN, Anggota Dewan dapil Banten I ini mengatakan pihaknya siap untuk mengkoordinasikan dengan Komisi terkait dan Kementerian Kesehatan. Hal ini bertujuan agar RS Delta Surya bisa memberikan pelayanan terbaik tidak hanya bagi Anggota Dewan, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia, khususnya domisili Jatim. (nap/sf)



**DR. H. R. A. DIMYATI
NATAKUSUMAH, SH, MH**

Wakil Ketua BURT DPR RI

"Jadi kita melihat Delta Surya ini kan dekat dengan airport, dengan sendirinya akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat kalau ada sesuatu hal terhadap (peserta) Jamkestama. Oleh sebab itu, RS Delta Surya ini harus lebih meningkatkan profesionalisme dan juga meningkatkan situasi dan kondisi dari rumah sakit itu agar memenuhi syarat untuk penanganan pasien-pasien jamkestama"

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Kunjungan Dapil, Nevi Zuairina Hadiri Peletakan Batu Pertama Sekolah Dhuafa di Pasaman Barat

KUTIPAN

Pasaman Barat (06/05) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah yang menyediakan pendidikan usia dini gratis bagi putra-putri Nagari Kajai yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Nevi dengan semangat ingin memajukan pendidikan merata di wilayah Sumatera Barat sangat mendukung aktivitas pendidikan ini karena upayanya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Sumbang secara menyeluruh.

Sekolah bernama Raudhatul Atfal Kasih ibu ini didirikan sejak 1 Januari 2013 dibawah naungan yayasan Kasih Ibu. Pendidikan gratis bagi dhuafa dan anak Yatim setiap tahunnya menampung 30 orang peserta didik.

Legislator asal Sumatera Barat II ini sangat gembira dengan dilakukan peletakan batu pertama artinya saran pendidikan ini sudah dimiliki sendiri.

Karena sebelumnya, lanjutnya, tempat proses belajar mengajar selama ini menggunakan satu petak rumah warga yang di sewa per tahun.

"Saya berharap, dengan dimilikinya sarana pendidikan ini oleh yayasan, kedepannya semakin berkembang dan para SDM nya semakin

bersemangat. Saya akan turut berupaya untuk berkontribusi sekuatnya sehingga pendidikan di sumbar ini terus berkembang secara merata hingga ke pelosok-pelosok", tutur Nevi.

Politisi PKS ini menerangkan, persiapan gedung milik sendiri ini hasil berawal dari hibah yayasan akan sebidang tanah sejak Januari 2013. Akhir Februari 2021 ada bantuan dari lembaga milik pemerintah pusat sebesar 10 juta rupiah.

"Saya berharap, pemerintah daerah juga dapat terus memberikan support pada lembaga-lembaga pendidikan seperti ini, agar ada kesempatan yang sama pada putra-putri bangsa mengenyam pendidikan yang berkualitas secara merata", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

"Saya berharap, dengan dimilikinya sarana pendidikan ini oleh yayasan, kedepannya semakin berkembang dan para SDM nya semakin bersemangat.

Saya akan turut berupaya untuk berkontribusi sekuatnya sehingga pendidikan di sumbar ini terus berkembang secara merata hingga ke pelosok-pelosok"

Update Data Dhuafa dengan Benar, Aleg PKS Harap Walikota Depok Libatkan Pejabat Terkait

KUTIPAN

Depok (05/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, dalam Kunjungan Derah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPR RI pada Ahad (28/03) di Kediaman Setyo Budi Leksono, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok.

Nur Azizah menyebutkan, seluruh ketua RT dan RW harus dilibatkan secara aktif dalam proses Verifikasi dan Validasi (Verwali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021.

Dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Ketua RT dan RW di Kelurahan Sukamaju ini, Nur Azizah menjelaskan bahwa melibatkan Ketua RT dan RW ini harus dilakukan untuk menghasilkan DTKS yang representatif sehingga bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sesuai dengan kriteria miskin yang telah ditentukan oleh

Kementerian Sosial.

"Perlibatan RT dan RW dalam perbaikan DTKS ini juga dapat meringankan kinerja dinas, pak Ketua RT dan RW ini merupakan orang yang diketahui, dan lebih memahami kondisi masyarakatnya. Sehingga jika pendataan dilakukan dengan sungguh-sungguh melibatkan unsur-unsur dari mulai Camat, Lurah, RW dan RT, selain prosesnya lebih cepat, juga data yang dihasilkan lebih representatif. Tentu pak Ketua RT dan RW ini, sebagai unsur yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, harus benar-benar amanah dalam mendata warganya", jelas nya .

Menurut Nur Azizah, ketua RT dan RW merupakan bagian dari para pimpinan yang membimbing masyarakat. Sebagaimana dalam level keluarga, seorang bapak merupakan pemimpin dalam keluarga kecilnya.

Nur Azizah memahami dengan baik, salah satu yang saat ini dihadapi ketua RT dan RW adalah masalah kedhuafaan warga. Daik dhuafa secara ekonomi, pendidikan dan ilmu agama. Karenanya Nur Azizah ingin agar para ketua RT dan RW ini dapat terus bersama-sama dengan Pemerintah Kota berkolaborasi mengentaskan problematika kedhuafaan di Indonesia.

"Setiap dari kita memiliki tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab secara pribadi kepada Allah, dan tanggung jawab kepada Allah dalam membimbing masyarakat. Kita sama-sama diniatkan bahwa dalam setiap amanah yang saat ini diembankan merupakan tanggung jawab dari Allah untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya", terang Nur Azizah.

Sementara itu menurut Ah-



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI

"Semoga Pemerintah Kota Depok dapat menjadi contoh pemutakhiran DTKS yg benar dan terkini. Di sini merupakan tugas saya selaku anggota dewan untuk mengawasi dan memastikan agar proses pemuktakhiran data ini berjalan dengan benar, baik di wilayah Dapil Depok-Bekasi maupun daerah lain"

mad Edison, Ketua RW 05, masalah yang saat ini dikeluarkan oleh RT/RW terkait pembagian bansos yang dinilai tidak adil.

"Kalau saya lihat, sebagian warga yang dapat itu mereka yang sebetulnya sudah hidup berkecukupan. Kalau pun ada bantuan yang disalurkan misalnya dari Pemkot, data

yang digunakan juga masih data-data yang lama. Sebagian ada yang taraf ekonominya sudah lebih baik, dan banyak juga yang sudah pindah rumah dan pindah domisil, namun terdapat sebagai penerima bansos", keluh Edison.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Acara Sosialisasi, Alifudin dukung Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana

KUTIPAN

Pontianak (06/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mendukung Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana - BKKBN.

Dukungan tersebut disampaikan saat menyampaikan materi sosialisasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin, (05/04/2021)

Kegiatan Sosialisasi di hadiri Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Koramil Pontianak Timur, Kapolsek Pontianak Timur, Lurah Saigon, dan peserta sosialisasi.

"Kita dukung bersama dan sukseskan bersama, dalam pendataan Keluarga tahun 2021, yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)" Ucap Alifudin pada saat penyampaian materi.

Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek

Perumahan Royal Mansion, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.

Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan pada 1 April – 31 Mei.

Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

"Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address, sebagai penyediaan

data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan" Ucap Arif Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, saat memberi sambutan.

Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga.

Petugas Pendataan Keluarga tahun 2021 terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari: 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7.230 Manajer Data, 83.441 Supervisor Tk Desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata.

BKKBN turut berperan aktif dalam upaya pemerintah mencegah dan menangani kasus stunting di Indonesia. Untuk mengatasi kasus stunting di Kalimantan Barat yang cukup tinggi.



H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Komisi IX DPR RI

"Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address, sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan"



Kundapil di Palabuhanratu

Slamet Bicara Kesejahteraan di Hari Nelayan Nasional



KUTIPAN

Sukabumi (07/04) --
Anggota Komisi IV
DPR dari Fraksi Par-
tai Keadilan Sejahtera
(F-PKS), Slamet

berharap nasib nelayan dapat lebih sejahtera dan pemerintah hadir untuk memberdayakan profesi ini.

Hal itu dikatakannya saat berkunjung ke Kampung Cipatuguran, Kelurahan dan Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Dalam kunjungan di Hari Nelayan Nasional, 6 April 2021 ini, Slamet meminta Pemerintah serius memberdayakan nelayan agar kehidupan mereka bisa lebih baik.

Slamet juga mengaku terus memikirkan program apa yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan ini.

"Saya mengucapkan

selamat Hari Nelayan Nasional. Mudah-mudahan nelayan kita atas adanya fungsi negara, bisa semakin berdaya," katanya kepada awak media.

Legislator Senayan asal Sukabumi ini menjelaskan bahwa beberapa program yang saat ini tengah dibahas bersama Dewan Pengurus Daerah atau DPD PKS Kabupaten Sukabumi untuk kesejahteraan nelayan adalah asuransi nelayan dan pemberdayaan istri-istri mereka.

"Saya juga akan terus mendorong bagaimana lahir program pemerintah yang sifatnya padat karya. Sebab itu akan berdayakan nelayan," katanya.

"Seperti di Sukabumi, program yang tertunda adalah pelabuhan samudera dan masukan lain dari nelayan yang juga akan kita dorong."

Dalam kesempatan ini Slamet juga memberikan sejumlah bingkisan kepada para nelayan sebagai bentuk empati untuk kehidupan mereka.



drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

"Beberapa program yang saat ini tengah dibahas bersama Dewan Pengurus Daerah atau DPD PKS Kabupaten Sukabumi untuk kesejahteraan nelayan adalah asuransi nelayan dan pemberdayaan istri-istri mereka. Saya juga akan terus mendorong bagaimana lahir program pemerintah yang sifatnya padat karya. Sebab itu akan memberdayakan nelayan"



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Gelar Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Rofik Ajak Guru Aktif Menulis

KUTIPAN

Purbalingga (09/04) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto mengajak para guru untuk aktif menulis.

Menurut Rofik, menulis adalah pintu membuka peradaban baru, bahkan di dunia bisnis pun kemampuan menulis sangat dibutuhkan.

"Salah satu ciri negara yang mempunyai peradaban tinggi adalah tingkat literasinya bagus, diantaranya menulis dan membaca. Hari ini Indonesia adalah negara dengan tingkat literasi terendah ke-2 di dunia. Ini sangat miris sekali," katanya.

Rofik mengatakan hal itu saat membuka Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk Guru SMA sederajat di Ballroom Halalmart BC 3 Purbalingga, Jumat (09/04).

Dia menambahkan, dulu orang menggunakan bahasa verbal untuk berkomunikasi yang tidak bisa menjangkai cakupan yang lebih luas. dan

menulis menjadi perpindahan zaman berburu dan nomaden dengan zaman menetap.

"Sebagai guru dituntut untuk menyiapkan anak didik sebaik mungkin dalam menghadapi masa depan. Guru harus menyiapkan anak didik untuk mampu bertarung di masa depan," kata Rofik di depan para guru yang berasal dari Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen itu.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai bonus demografi dengan usia produktif yang mencapai 24 persen atau 65 juta penduduk Indonesia. Jika mereka tidak disiapkan sedari sekarang maka ke depan mereka akan menjadi beban negara.

"Karena itu saya menilai kemampuan literasi,

penting. Jika negara sudah membiasakan masyarakatnya berliterasi maka kebiasaan itu akan berkembang menjadi sebuah budaya literasi. Akan ada buku di setiap tempat dan setiap waktu," ujarnya.

Dia menuturkan, ada 5 negara dengan budaya literasi yang tinggi. Yakni Finlandia, Belanda, Swedia, Australia dan Jepang. Di negara-negara tersebut negara mengambil peran yang strategis untuk menumbuhkan budaya literasi kepada penduduknya.

"Ada negara yang mengirimkan paket buku untuk anak-anak yang baru lahir dan ibunya. Di Australia ada tantangan membacakan 1000 buku sebelum anak usia 5 tahun. Anak usia 15 tahun ada tantangan membaca 1000 buku dalam waktu 4 bulan," katanya.

Kepala Balai Informasi dan Konservasi Kebumihan- Karang Sambung, Indra Riswadinata mengatakan, publikasi ilmiah itu sudah menjadi keharusan, dan pimpinan LIPI sangat mengapresiasi kegiatan ini.

"LIPI sebagai pembina kegiatan penelitian sangat merasakan pentingnya kegiatan semacam ini," katanya dalam kegiatan yang menghadirkan pembicara peneliti Pusat Penelitian Biomaterial LIPI Dr Dede Heri Yuli Yanto, M.Agr. beserta tim.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Indonesia mempunyai bonus demografi dengan usia produktif yang mencapai 24 persen atau 65 juta penduduk Indonesia.

Jika mereka tidak disiapkan sedari sekarang maka ke depan mereka akan menjadi beban negara. Karena itu saya menilai kemampuan literasi, kemampuan menulis ini penting. Jika negara sudah membiasakan masyarakatnya berliterasi maka kebiasaan itu akan berkembang menjadi sebuah budaya literasi. Akan ada buku di setiap tempat dan setiap waktu

Tak Kenal Lelah Meski Terlelap di Speedboat, Sahrul Aidi Kunjungi Teluk Belengkong

KUTIPAN

Indragiri Hilir (08/04) — Meski harus menyusuri perjalanan yang cukup panjang dan menguras energi, Anggota DPR RI Ustadz Sahrul Aidi Mazaat penuh janjinya tiba di salah satu desa di Indragiri Hilir yakni Desa Hibrida Mulia, Kecamatan Teluk Belengkong (Senin, 5 April).

Menggunakan speedboat berjam-jam, lalu dilanjutkan menggunakan koci, dan menyusuri jalanan Desa Hibrida Mulia, Ustadz Sahrul tampak tanpa lelah untuk kesekian kalinya mendatangi Kabupaten Indragiri Hilir. Anggota DPR RI yang menyuarakan dan mendukung pembangunan desa ini, nampak tidak main-main dengan harapannya memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat desa. Dalam hal ini kepeduliannya terhadap Inhil sebagai Komisi V DPR RI Dapil Riau 2, Inhil.

Tanpa diiringi seremonial yang berlebihan, Ustadz Sahrul

tampak akrab bercengkerama dengan masyarakat setempat.

Dimulai dengan mengisi kajian Subuh, sebagai seorang Dai Mubaligh, Ustadz Sahrul selalu menekankan pentingnya menjaga keimanan, apalagi menjelang Ramadhan.

"Kita perlu mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadhan yang mulia. Tetap jaga istiqomah dan tingkatkan ibadah, karena amalan akan dilipatgandakan. Penting ini selalu saya ingatkan." Terang Ustadz Sahrul.

Selanjutnya Sahrul Aidi Lc bertolak ke balai desa memberikan sosialisasi

pembangunan untuk desa, sekaligus menerima aspirasi masyarakat, Desa Hibrida Mulia Kecamatan Belengkong. Dengan komitmen bagi kades yang hadir di acara ini akan diberikan bantuan bedah rumah untuk masyarakatnya, yakni yang layak dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kesempatan tersebut Ustadz sahrul juga sekaligus menyerahkan bantuan perangkat Al-Qur'an untuk Desa Hibrida Mulia.

"Pembangunan Desa perlu diperhatikan, sehingga masyarakat kecil yang ada di desa-desa juga ikut merasakan gairah kemajuan. Desa merupakan landasan pokok, demi menyejahterakan masyarakat Riau, secara adil." Pungkas Beliau yang merupakan Anggota Fraksi PKS RI di Senayan Jakarta.



H. SYAHRUL AIDI MAZAT, Lc., M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau II

"Kita perlu mempersiapkan diri menjelang bulan suci Ramadhan yang mulia. Tetap jaga istiqomah dan tingkatkan ibadah, karena amalan akan dilipatgandakan. Penting ini selalu saya ingatkan"

Aleg PKS Minta Pemerintah Bantu Petani Buah dengan Pendampingan dan Akses Pasar

KUTIPAN

Pemerintah, mempunyai instansi yang bisa memberikan pendampingan kepada petani buah yaitu Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu) yang berlokasi di Arian, Kabupaten Solok.

Padang (10/04) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, meminta Pemerintah agar melakukan pendampingan serta membuka pasar domestik dan internasional bagi produk buah tropika. Terlebih produk paska panen buah agar petani mendapatkan nilai tambah.

Terlebih produk paska panen buah agar petani mendapatkan nilai tambah.

"Dengan nilai tambah, berupa harga yang lebih tinggi dan tentu keuntungan yang lebih besar, tentu akan membuat petani senang dan bersemangat menanam dan merawat buah secara

berkelanjutan," ujar Hermanto.

Pemerintah, lanjutnya, mempunyai instansi yang bisa memberikan pendampingan kepada petani buah yaitu Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu) yang berlokasi di Arian, Kabupaten Solok. "Produk tanaman buah tropika unggul yang dikembangkan oleh Balitbu hendaknya disebarkan ke masyarakat agar terjadi peningkatan produktivitas dan mutu tanaman buah dengan standar kualitas untuk ekspor," papar legislator dari FPKS DPR ini.

Kedepan secara bertahap, lanjutnya, tanaman buah yang tersebar ditengah masyarakat

hendaknya memiliki standar yang sama seperti yang dikembangkan di kebun yang dikelola Balitbu.

"Petani buah harus mendapatkan nilai tambah yang maksimum baik kualitas maupun kuantitasnya," tandas Hermanto.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joynaldy menghadiri kegiatan Open House Balitbu dan Peringatan International Fruits and Vegetable Years 2021 di Arian, Kabupaten Solok. Pada kegiatan tersebut Menteri melepas keberangkatan ekspor hasil tanaman tropika (manggis). Menteri menyaksikan juga gelar teknologi produk paska panen buah tropika.

"Kehadiran Menteri semoga bisa memberikan semangat dan motivasi baik bagi Balitbu maupun petani tanaman buah tropika di Sumatera Barat," pungkas legislator dari dapil Sumbar I ini.



Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Dengan nilai tambah, berupa harga yang lebih tinggi dan tentu keuntungan yang lebih besar, tentu akan membuat petani senang dan bersemangat menanam dan merawat buah secara berkelanjutan



Sosialisasi Dapil di Kab. Banjar, Kalsel

Habib Aboe Bakar: Kedepankan Persatuan Dalam Pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan

KUTIPAN

Kabupaten Banjar (10/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi kembali mengingatkan pentingnya mengutamakan nilai persatuan dan kesatuan.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Habib Aboe ini dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (09/04/2021).

"Kita harus kedepankan persatuan dan kesatuan saat pelaksanaan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Kalimantan Selatan. Hal ini penting untuk diingatkan dalam upaya menjaga keamanan dan suasana kondusif di Kalimantan selatan", papar Anggota MPR RI dari dapil Kalimantan Selatan 1 tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyampaikan bahwa Pemungutan Suara

Ulang (PSU) adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang harus di hormati.

"Soal PSU ini adalah putusan MK yang harus kita hormati dan kita laksanakan. Hal ini adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Disini diperlukan kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara, yaitu dengan sikap terus menjaga kerukunan diantara para warga, itu adalah nilai penting dari pilar kebangsaan," papar Anggota Komisi III tersebut.

"Memang setiap PSU memiliki potensi gesekan antar kelompok masyarakat di lapangan. Namun saya memiliki

keyakinan bahwa warga banua akan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas persoalan apapun, termasuk Pilkada ini", terang Ketua MKD tersebut.

Habib Aboe Bakar meminta agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang provokatif atau tindakan yang berpeluang memicu konflik akibat PSU ini.

"Kesadaran semua pihak penting sekali, untuk menempatkan PSU ini tidak terlalu berlebihan. Kita laksanakan PSU ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga Kalsel akan tetap aman dan kondusif sepanjang pelaksanaan PSU," pesan Ketua MKD pada peserta kegiatan.

**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

"Kesadaran semua pihak penting sekali, untuk menempatkan PSU ini tidak terlalu berlebihan. Kita laksanakan PSU ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga Kalsel akan tetap aman dan kondusif sepanjang pelaksanaan PSU

Silaturahmi saat Reses, Anis: MUI dan PKS Miliki Kesamaan Ruh Perjuangan untuk **Melayani Umat**

KUTIPAN

Jakarta (16/04) — Mengisi awal masa resesnya, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI Jakarta 1 Jakarta Timur, Anis Byarwati, bersilaturahmi dengan jajaran pengurus MUI Jakarta Timur pada Jum'at, 16 April 2021.

Silaturahmi ini berlangsung di kediaman Didi Supandi, Ketua Umum MUI Jakarta Timur, yang didampingi oleh jajaran pengurus MUI Jakarta Timur.

Membuka pertemuan ini, Anis juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan rasa terima kasihnya atas penerimaan jajaran pengurus MUI Jakarta Timur yang sangat baik.

Selanjutnya Anis menyampaikan peran dan fungsinya sebagai anggota DPR RI yang dipilih PKS mewakili DAPIL DKI Jakarta 1 Jakarta Timur.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh

kekeluargaan ini, MUI diwakili oleh Didi Supandi menyampaikan terima kasihnya kepada Anis yang telah berkenan berkunjung dan berdialog dengan pengurusnya.

Didi Supandi menyatakan bahwa kunjungan seperti ini yang mempertemukan anggota dewan dengan stakeholder masyarakat, merupakan langkah anggota dewan yang sangat baik dan perlu terus dilakukan.

Secara khusus, Didi Supandi menyampaikan terima kasih kepada PKS yang telah melakukan berbagai kebaikan dan pembelaan kepada umat baik di tingkat wilayah Jakarta Timur maupun di tingkat nasional.

"PKS dan MUI memiliki ruh perjuangan yang sama yaitu menjadi pelayan umat. Semangat bersama kita adalah memberi kebaikan untuk umat," tuturnya.

Didi juga mengingatkan bahwa sebagai partai politik, PKS dan partai lainnya tidak bisa hanya memperhatikan kelompoknya sendiri.

"Walaupun pada awalnya partai itu mengandung arti bagian (part), namun bukan berarti partai harus memperhatikan bagiannya saja," terangnya.

Lebih lanjut Didi menjelaskan bahwa partai harus menjalankan peran dan fungsi universal, memperhatikan masyarakat dan umat keseluruhan.

"Setelah membangun yang terdekat kemudian kepada yang terdekat selanjutnya. Setelah membantu keluarga besar PKS, dilanjutkan dengan khidmatul ummah, membantu umat," katanya.

"Kiprah kita tidak terbatas untuk partai, tapi juga untuk masyarakat lebih luas. Memberdayakan dan menghampiri



Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

"Program Rumah Digital MUI Jakarta Timur Ini adalah langkah yang bagus, bonus demografi Indonesia, di rentang tahun 2020 – 2035 harus dihadapi dengan strategi yang tepat dalam meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif, termasuk generasi milineal, agar memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi, termasuk dalam meningkatkan Ekonomi Indonesia"

masyarakat khususnya yang termarjinalkan," tekannya.

Hal lain yang juga ditegaskan Didi mengenai pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemajuan dari semua aspek. Baik aspek Pendidikan, ekonomi, social dan

yang lainnya.

Didi juga berpesan agar dalam menjalankan amanah yang diberikan Allah dan rakyat, anggota dewan bekerja untuk kemaslahatan umat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Profil

- Nama Lengkap
Dr. Hj. Netty Prasetyani,
S.S., M.Si.
- Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 15 Oktober 1969
- Dapil
Jawa Barat VIII



Pendidikan

- **SMAN 14 Jakarta**
- **S1 Bahasa Inggris**
STBA LIA
- **S2 Kajian Wanita**
Program Pasca
Sarjana
Univ. Indonesia
- **S3 Ilmu Pemerintahan**
FISIP Univ. Padjadjaran



Riwayat Organisasi

- **Ketua Tim Penggerak PKK, 2008-2018**
- **Ketua Dekranasda, 2008-2018**
- **Ketua P2TP2A Jawa Barat, 2010-2018**
- **Ketua Ikatan Bank Mata Jabar, 2009-2017**
- **Pembina Yayasan Bordir Jabar,**
2010- sekarang
- **Penasihat Dharma Wanita**
Persatuan Provinsi Jabar, 2008-2018



Keluarga

- Suami : **Ahmad Heryawan**
- Anak : **4 Laki-Laki**
2 Perempuan



Riwayat Pekerjaan

- **Kepala TKIT Darul Falah,**
1998-2001
- **Konsultan Pendidikan Perguruan**
Madina, 2005-2007
- **Dosen FISIP UNPAD,**
2017-sekarang
- **Anggota Komisi IX DPR RI,**
2019-2024



Media Sosial

- fb : **Netty Prasetyani Heryawan**
- tw : **@netty_heryawan**
- ig : **netty_heryawan**
- yt : **Netty Prasetyani Official**



NETTY
PRASETIYANI

Terima Aspirasi Komite Ekraf Provinsi Jambi, Fraksi PKS akan **Teruskan** ke Kemenparekraf

KUTIPAN

Jakarta (03/04) --- Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dan masukan dari Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi yang dilakukan secara daring, Selasa, (06/04/2021).

Ketua Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi, Berlian Santosa, dalam paparan aspirasinya mengatakan beberapa program dan kegiatan telah dilakukan untuk membantu dalam membangun Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi. Namun sejauh ini, hanya menjadi penonton dan tak banyak dilibatkan dalam program nasional.

"Beberapa program telah kami buat untuk membangun Ekonomi Kreatif di Jambi, hanya saja perlu ada support dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam menggarap dan menyelesaikan program nasional. Harapan kami jangan jadikan kami hanya penonton saja, akan tetapi libatkan kami untuk menghandle acara

bersama bukan sebatas menonton," ungkap Barlian Santosa.

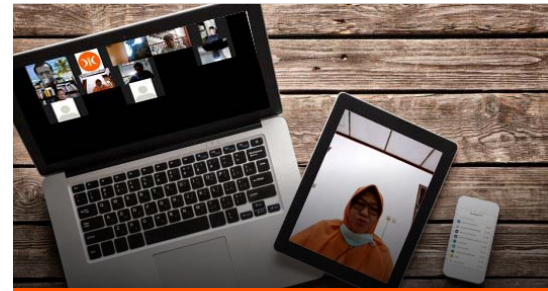
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah saat menyambut aspirasi dari Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi mengatakan, saat ini pelaku ekonomi kreatif sudah mulai memiliki sudut pandang yang bagus, terutama bagi produk yang seharusnya memiliki nilai tambah.

"Ekraf termasuk baru dalam dunia birokrasi meski Undang-undang sudah beberapa tahun, harus mengubah paradigma karena menangani ekraf harus memahami ekosistem ekonomi kreatifnya dari hulu sampai hilir

dengan pendekatan utama karya yang dapat didaftarkan hak kekayaan intelektualnya", ungkap Ledia.

Ledia menambahkan, kekurangan yang ada dalam birokrasi kita adalah kolaborasi, jadi perlu usaha untuk menyamakan, seperti halnya di departemen industri yang memiliki satu bidang khusus ekonomi kreatif.

"Idealnya... Kalau dalam Undang-undang itu kita mendorong adanya kolaborasi antar bidang, karena ekonomi kreatif itu tidak bisa berjalan dan berdiri sendiri. Ekonomi kreatif itu harus digarap lintas sektor. Dan saya akan juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan dari Jambi, untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan tim ekonomi kreatif," tutup Ledia.



Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

"Kekurangan yang ada dalam birokrasi kita adalah kolaborasi, jadi perlu usaha untuk menyamakan, seperti halnya di departemen industri yang memiliki satu bidang khusus ekonomi kreatif. Idealnya..

Kalau dalam Undang-undang itu kita mendorong adanya kolaborasi antar bidang, karena ekonomi kreatif itu tidak bisa berjalan dan berdiri sendiri. Ekonomi kreatif itu harus digarap lintas sektor. Dan saya akan juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan dari Jambi, untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan tim ekonomi kreatif

Hadir di Kuliah Virtual UII,

Aleg PKS Tegaskan Posisi PKS sebagai Oposisi

KUTIPAN

Jakarta (16/4) Anggota DPR RI F-PKS Mulyanto hadir dalam acara kuliah umum virtual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Acara ini membahas mengenai revitalisasi peran fraksi di DPR RI dalam pengusulan dan pembahasan RUU aspiratif. Dalam acara yang dihadiri oleh mahasiswa dan akademisi tersebut, Mulyanto menegaskan kembali posisi Fraksi PKS sebagai oposisi di pemerintahan.

"Kami di DPR RI ini memilih oposisi sebagai cara kami untuk berkontribusi kepada rakyat. Dengan mengawasi jalannya pemerintahan, kami bisa mengingatkan pemerintah jika mereka mengambil kebijakan yang tidak benar.

Kalau salah-salah, bisa kita semprit" ujar Mulyanto.

Menurut Mulyanto, sikap oposisi ini bukanlah sikap melawan asas-asas negara. Sebab, oposisi yang dimaksud adalah oposisi terhadap sikap pemerintah yang tentu saja memiliki kelemahan khususnya dalam taat terhadap konstitusi. Terlebih lagi, selalu ada potensi-potensi penyalahgunaan wewenang pemerintah.

"Sikap kita ini bukanlah sikap anti negara maupun sikap anti kebangsaan. Sebaliknya, kita justru membantu negara dan bangsa dengan melakukan oposisi" ujar Mulyanto.

Terakhir, Mulyanto berharap agar acara ini dapat menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa khususnya mengenai peraturan perundangan-undangan dan peran Fraksi dalam penyusunan Undang-undang di DPR.

"Saya berharap semoga kuliah virtual ini dapat menghasilkan mahasiswa hukum yang berprestasi dan memiliki kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara" tutup Mulyanto



Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Inbang

"Kami di DPR RI ini memilih oposisi sebagai cara kami untuk berkontribusi kepada rakyat. Dengan mengawasi jalannya pemerintahan, kami bisa mengingatkan pemerintah jika mereka mengambil kebijakan yang tidak benar. Kalau salah-salah, bisa kita semprit"

Apresiasi Pernyataan
Ramadhan Presiden Biden,

HNW: Sinyal Positif Koreksi Rasisme dan Islamophobia

KUTIPAN

Jakarta (15/04) — Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi pernyataan awal Ramadhan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden,

serta berharap persoalan rasisme dan Islamophobia yang semakin parah di negara tersebut dapat diatasi, dan bisa ditularkan ke negara-negara barat lainnya.

"Pernyataan Presiden AS, Joe Biden, yang positif dan secara terbuka disampaikan di awal bulan Ramadhan, dan memberikan harapan yang baik bagi Muslim di Amerika Serikat dan dunia, sangat wajar diapresiasi dan didukung. Dan kita juga patut berharap agar pernyataan itu betul-betul dilaksanakan, tidak sekedar basa-basi politik, demi keadilan hukum dan hak asasi manusia (HAM), sebagai solusi terhadap

persoalan rasisme, anti-asia dan Islamophobia yang mengancam kehidupan di AS dll-nya," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (15/04).

HNW sapaan akrabnya mencatat beberapa pernyataan penting dari Presiden Biden yang patut digarisbawahi.

"Pertama, komitmen pemerintahan Joe Biden untuk melindungi hak dan keamanan semua warga AS, termasuk para muslim yang kerap menghadapi bullying, bigotry dan hate crimes. Ini telah ditunjukkan dengan dicabutnya kebijakan 'Muslim Travel Ban' yang sangat memalukan di era Donald Trump. Ini juga sinyal

AS," ujar Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II termasuk Luar Negeri ini.

Kedua, lanjutnya, komitmen pemerintahan Joe Biden yang akan terus berdiri menegakan hak asasi manusia dimapun, termasuk untuk masyarakat Uyghurs di China, Rohingya di Myanmar dan masyarakat Muslim di seluruh dunia.

"Ini pernyataan yang sangat positif dan perlu diresapi bersama. Semoga ini juga diikuti oleh pemimpin di negara-negara yang ada minoritas Muslim yang masih merasakan Islamophobia, seperti di Perancis," sebutnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan bahwa pernyataan Presiden Biden tersebut harus bisa juga dijawab secara bertanggung jawab, serta tantangan bagi komunitas muslim di Amerika Serikat untuk menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya, yakni profesional, ramah, bukan teroris atau radikal, melainkan Islam yang rahmatan lil 'alamin. Ia berharap para WNI yang beragama Islam di Amerika Serikat, dapat berperan lebih aktif dalam menunjukkan hal tersebut.

"Saya berinteraksi dengan banyak muslim WNI di AS dalam kesempatan serap aspirasi atau kegiatan lainnya, dan percaya serta optimis bahwa saudara-saudara WNI yang Muslim



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Kita juga patut berharap agar pernyataan itu betul-betul dilaksanakan, tidak sekedar basa-basi politik, demi keadilan hukum dan hak asasi manusia (HAM), sebagai solusi terhadap persoalan rasisme, anti-asia dan Islamophobia yang mengancam kehidupan di AS dll-nya."

disana bisa menunjukkan wajah dan jatidiri Islam yg rahmatan lil alamin dan bukan teroris maupun radikal. Apalagi, beberapa imam komunitas Muslim di AS berasal dari Indonesia, mereka secara terbuka telah selalu

menunjukkan wajah dan hakekat Islam yang Rahmatan lil 'alamin tersebut kepada masyarakat AS, seperti Imam Shamsi Ali di New York atau Imam Mohammad Joban di Redmond (Seattle)," pungkasnya.



DO'A UNTUK KRI NANGGALA 402

Kita prihatin dan berduka dengan musibah
hilang kontaknya Kapal Selam KRI
Nanggala 402 di Laut Perairan Utara Bali

Berharap kapal dan 53 Awaknya dapat
ditemukan serta dalam kondisi selamat

Kita berikan doa terbaik.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi

Ketua MKD DPR RI

Silaturahmi Kebangsaan PKS dan PPP Hasilkan 7 Poin Kesepahaman Bersama

KUTIPAN

Jakarta -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan 7 poin kesepahaman yang dihasilkan dalam diskusi Silaturahmi Kebangsaan antara PKS dan PPP di Gedung MD Building DPP PKS, Rabu (14/04/2021).

"Sebagai partai Islam tertua di Indonesia, kiprah dan kontribusi PPP sudah sangat panjang bagi umat dan bangsa. Begitu pun dengan PKS sebagai partai Islam yang lahir dari rahim reformasi. Dalam Silaturahmi ini telah disepakati 7 poin kesepahaman antara PKS dan PPP," jelas Habib Aboe.

Habib Aboe menyebutkan sebagai partai yang turut serta dalam membangun bangsa PKS dan PPP berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara.

"Pertama berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila dari ancaman komunisme, terorisme, radikalisme, separatisme, sekularisme

dan berbagai ancaman lainnya. Selain itu yang kedua juga akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi dalam bentuk kerja sama politik di ranah kontestasi politik maupun kebijakan publik," tutur Habib Aboe.

Sebagai partai Islam, keduanya juga berkomitmen untuk mengajak umat Islam di Indonesia serta hadir dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin.

"Kami juga berkomitmen untuk mengajak umat Islam Indonesia dalam menampilkan, menghadirkan, dan mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat," ucap Habib Aboe.

Habib Aboe menyebutkan kesepahaman juga terbentuk

dalam aspek ekonomi, sosial, serta upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Ada juga komitmen dalam membangun dan memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah seta UMKM. Dalam ekonomi ini Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat perekonomian syariah dan pengembangan industri halal dunia. Selain itu ada juga komitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis yang ditimbulkan dari Covid-19 khususnya yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan rakyat," terang Habib Aboe.

Selain itu, mencermati dengan saksama dampak perubahan iklim global, PKS dan PPP akan berkolaborasi dalam menanggapi isu lingkungan.

"Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan mengajak segenap masyarakat agar turut aktif mencegah kerusakan kerusakan lingkungan, berhemat energi, berhemat air, menihilkan penggunaan plastik serta mengelola sampah dan limbah untuk kemanfaatan dan keberlangsungan kehidupan," ujar Habib Aboe.

Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1442 H kedua par-



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI
Sekjen DPP PKS

"Sebagai partai yang turut serta dalam membangun bangsa PKS dan PPP berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI dari ancaman yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan negara."

tai ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikannya sebagai bulan muhasabah dan peduli pada sesama.

"Di bulan Ramadhan ini, kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk saling peduli dan berbagi

terhadap sesama atas musibah yang melanda bangsa Indonesia, dari mulai banjir, gempa bumi, juga kepedulian kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," ajak Habib Aboe.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
fraksipksdprri
-  Twitter
@fraksipksdprri
-  Facebook
Fraksi PKS DPR RI
-  Youtube
PKSTV DPR RI

***Nantikan
Setiap Pekan***